



Evaluasi Dampak Rantai Pasok Keluarga Berencana di Indonesia

Evaluasi dampak dari intervensi penguatan rantai pasok yang dilaksanakan di 11 kabupaten/kota

Pilihanku

SEPTEMBER 2018



Laporan Evaluasi Akhir Program PilihanKu

Laporan ini disusun oleh JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) bagian dari Proyek PilihanKu, dengan dana yang disalurkan melalui Johns Hopkins Center for Communication Programs, sejak tanggal 1 November 2014. Komponen rantai pasok dari proyek ini dilaksanakan oleh JSI dengan tujuan untuk memperkuat rantai pasok alat dan obat kontrasepsi (alokon) serta meningkatkan ketersediaan alokon di 11 kabupaten/kota di empat provinsi terpilih di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

JSI mengucapkan terima kasih kepada semua responden yang telah berpartisipasi dalam evaluasi ini atas masukan mereka yang berharga, termasuk responden dari BKKBN Pusat dan Provinsi, Kantor Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan di fasilitas kesehatan. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada tim di Universitas Indonesia – Pusat Penelitian Kesehatan yang telah memimpin kegiatan pengumpulan data penilaian kuantitatif ini juga para petugas pengumpul data di lapangan.

Pada akhirnya, evaluasi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari Johns Hopkins Center for Communication Programs dan para mitra PilihanKu, disertai dedikasi dari staf dan konsultan JSI yang menjadi bagian dari tim evaluasi.

Abstrak

Laporan ini menguraikan hasil evaluasi akhir (*endline*) dari rantai pasok keluarga berencana di kabupaten/kota PilihanKu di Indonesia untuk memahami dampak dari intervensi penguatan sistem rantai pasok dan untuk memberi rekomendasi terkait.



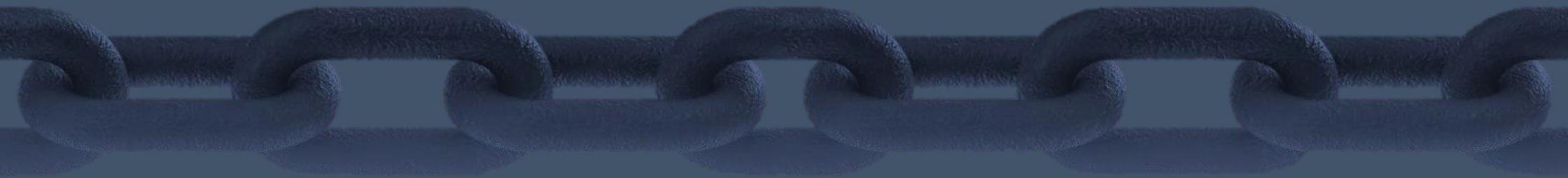
Daftar Isi

		5 Gambaran Umum dan Latar Belakang	16 Metodologi
Temuan dan Rekomendasi:	24 I. Ketersediaan Produk	30 II. Kuantifikasi & Pengadaan	34 III. Manajemen Inventaris
	42 IV. Distribusi	47 V. SIM-LOG (LMIS)	53 VI. Penyimpanan
	66 Kesimpulan dan Tindak Lanjut	69 Apendiks	

Daftar Singkatan/Istilah

BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Indonesia
BL	<i>Baseline Assessment</i> /Penilaian Data Dasar
CPR	<i>contraceptive prevalence rate</i> /Angka Pemakaian Kontrasepsi
CTU	contraceptive technical update/Teknologi Kontrasepsi Terkini
DKI Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
eLMIS	<i>electronic logistics management information system</i>
EL	<i>Endline Assessment</i> /Penilaian Data Akhir
FEFO	<i>first-to-expire, first-out</i>
FP	<i>family planning</i> /Keluarga Berencana
FEFO	<i>first-to-expire, first-out</i>
FP	<i>family planning</i> /Keluarga Berencana
IUD	intrauterine device/alat kontrasepsi dalam rahim
JSI	JSI Research & Training Institute, Inc.
LARC	long-acting reversible contraceptive/metode kontrasepsi jangka panjang reversible
LIAT	<i>Logistics Indicators Assessment Tool</i>
LSAT	<i>Logistics System Assessment Tool</i>
LMIS	<i>logistics management information system</i> /Sistem Informasi Manajemen Logistik

M&E	<i>monitoring and evaluation</i> /pemantauan dan evaluasi
mCPR	<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> /Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern
MIM Tool	<i>Inventory Management & Monitoring Tool</i>
MOS	<i>months of stock</i> /rasio bulan ketersediaan stok
NGO	<i>non-governmental organization</i> /Lembaga swadaya masyarakat
ODK	<i>Open Data Kit</i>
OJT	<i>On the job training</i> /pelatihan di tempat pekerjaan
puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
QIT	<i>Quality Improvement Team</i> /Tim Peningkatan Kualitas
R&R	<i>reporting & recording</i> /Pencatatan & Pelaporan
SBBK	Surat Bukti Barang Keluar
SCM	<i>supply chain management</i> /pengelolaan rantai pasok
SDP	<i>service delivery point</i> /fasilitas layanan kesehatan
SOH	<i>stock on hand</i> /Stok yang tersedia
SOP	<i>standard operating procedures</i> /prosedur operasional standar
TOC	<i>theory of change</i>
UI-PPK	Universitas Indonesia – Pusat Penelitian Kesehatan



Gambaran Umum dan Latar Belakang

Proyek PilihanKu

Visi proyek “PilihanKu” adalah mendukung tujuan keluarga berencana (KB) Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) menjadi 61,3% di tahun 2020. Proyek PilihanKu melakukan pendekatan yang berfokus pada konsumen sekaligus digerakkan oleh konsumen untuk membantu Indonesia mengatasi angka CPR yang stagnan, angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), dan ragam metode yang saat ini condong meninggalkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. PilihanKu bermitra dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan berfokus pada faktor-faktor yang ada, baik di sisi permintaan ber-KB (*demand*) maupun di sisi suplai yaitu mencakup tahap kehidupan konsumen, kesiapan fasyankes/KB paska persalinan, manajemen rantai pasok (*SCM*), kepemimpinan dan advokasi, serta pengumpulan data, analisis dan pemanfaatannya secara terdesentralisasi. Melalui pendekatan ini PilihanKu mengembangkan model *demand-supply* yang terpadu untuk menjangkau generasi baru pengguna KB.

Tujuan PilihanKu adalah meningkatkan mCPR sebanyak lima persen di tiap kabupaten/kota dari 11 lokasi proyek, yang berarti mendukung tujuan nasional.

JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) menangani komponen pengelolaan rantai pasok dengan tujuan meningkatkan ketersediaan metode kontrasepsi BKKBN di fasyankes yang terdaftar pada sistem BKKBN di empat provinsi dan 11 kabupaten/kota lokasi PilihanKu.



Pengelolaan Rantai Pasok

Tujuan dari komponen rantai pasok adalah untuk meningkatkan ketersediaan alokon dan menurunkan tingkat *stockout* yang terjadi di fasyankes dan di gudang provinsi dan kabupaten/kota. Pada *baseline assessment* atau penilaian data dasar didapati bahwa hanya 55% dari fasyankes memiliki stok untuk semua metode. Tujuan PilihanKu adalah untuk meningkatkan ketersediaan alokon sebesar 15% menjadi 70%. Perbaikan kinerja rantai pasok akan meningkatkan akses terhadap seluruh metode kontrasepsi dan turut berkontribusi kepada sasaran proyek PilihanKu yang lebih luas yaitu meningkatkan CPR sebesar 5% di kabupaten/kota lokasi proyek.

PilihanKu menerapkan pendekatan dari segi sistem untuk memperkuat pengelola rantai pasok di tiap tingkat. Petugas dilengkapi dengan *tool* atau alat bantu baru, juga keterampilan dan informasi yang memberdayakan mereka sehingga peningkatan rantai pasok berlangsung secara holistik dan kontinu. Tim PilihanKu bersama pemangku kepentingan merancang paket intervensi rantai pasok yang komprehensif dan berpusat pada data untuk mengatasi kesenjangan penting yang ada dalam sistem. PilihanKu memusatkan perhatian pada empat bidang fokus berikut ini yang dipandu oleh tiga tema kunci – penguatan kapasitas organisasi, kolaborasi dan akuntabilitas, dan menanamkan budaya penggunaan data untuk perbaikan rantai pasok secara kontinu.

PROSES PENINGKATAN RANTAI PASOK



Gambar 1: Proses Peningkatan Rantai Pasok

Intervensi Proyek



Manajemen Inventaris

Hambatan: Pasokan ulang berdasarkan target layanan, sedangkan ketiadaan sistem kontrol inventaris yang tepat menyebabkan distribusi alokon ke titik pasokan ulang dan fasyankes tidak merata. Ini menyebabkan ketidakseimbangan stok dan *stockout* yang signifikan.

Solusi: PilihanKu merancang dan menerapkan sistem kontrol inventaris berbasis konsumsi yang dinamis dengan jadwal distribusi tetap dan titik pemicu standar sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memberikan pasokan darurat atau realokasi. Dengan demikian sistem lebih dapat menyesuaikan dengan perubahan dalam kebutuhan.



Pencatatan dan Pelaporan Logistik

Hambatan: Sistem rantai pasok yang tangguh memerlukan data logistik yang berkualitas dan tepat waktu. BKKBN memiliki SIM-LOG yang baik tapi pengelolaan pencatatan di fasyankes yang buruk menyebabkan rendahnya kualitas laporan sehingga data tidak banyak digunakan.

Solusi: PilihanKu meningkatkan kapasitas petugas Gudang dan fasyankes dengan instruksi kerja (job aid) dan video tutorial untuk meningkatkan akurasi catatan dan laporan.



Tim Peningkatan Kualitas

Hambatan: Fungsi rantai pasok melibatkan berbagai bagian dan tingkat yang seringkali beroperasi sendiri-sendiri. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar bagian menyebabkan sistem rantai pasok tidak efisien.

Solusi: Model Tim Peningkatan Kualitas (TPK) adalah mekanisme yang mendukung kolaborasi antar berbagai bagian/tingkat dan menanamkan budaya penggunaan data untuk memantau dan meningkatkan kinerja rantai pasok.



Pendampingan dan Pelatihan *On-the-Job (OJT)*

Hambatan: Program KB tidak memiliki mekanisme monitoring dan supervisi rutin. Mutasi petugas yang tinggi menjadi tantangan dalam peningkatan kapasitas.

Solusi: Diperkenalkan program pendampingan dan pelatihan *on-the-job (OJT)* untuk meningkatkan kapasitas fasyankes melalui pembinaan dan pemberian umpan balik. Mentor juga menggunakan daftar tilik atau *checklist* monitoring yang memberi dimensi tambahan atas data untuk pengambilan keputusan.



Ringkasan Temuan

Endline assessment atau evaluasi akhir menggali informasi apakah intervensi yang diterapkan dapat mengatasi hambatan sehingga proyek dapat memberi rekomendasi mengenai intervensi yang perlu direplikasi di kabupaten/kota dan provinsi lain. Berikut ini adalah ringkasan dari temuan secara keseluruhan:

Ketersediaan Produk

Ketersediaan alokon telah membaik signifikan. Didapati pada *endline assessment* bahwa di hari evaluasi dilaksanakan, 68% fasyankes memiliki stok dari semua alokon. Bandingkan dengan *baseline* yang hanya didapati di 55% fasyankes. Perbaikan tertinggi terjadi pada metode KB suntik dari 70% saat *baseline* menjadi 97% di *endline*. Secara rata-rata untuk semua metode mengalami penurunan *stockout* di fasyankes sebesar 47%.

Kuantifikasi & Pengadaan

Penundaan dalam proses pengadaan di tingkat pusat terus memberi dampak signifikan di tingkat yang lebih bawah. Sebelum proyek PilihanKu satu-satunya data yang digunakan untuk memperkirakan (*forecast*) kebutuhan alokon adalah target layanan yang mengakibatkan ketidakseimbangan stok di seluruh sistem. Di tahun 2017 PilihanKu memberi dukungan pada BKKBN untuk menyusun Buku Referensi Kuantifikasi Alokun, yang mencakup metode *forecast* berdasarkan konsumsi, layanan dan demografi/target. Karena baru diterapkan di tahun 2017 maka dampaknya masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Manajemen Inventaris

Baseline assessment mengidentifikasi penggunaan target layanan sebagai dasar keputusan pasokan ulang, dan sistem kontrol inventaris yang tidak memadai sebagai dua isu penting yang mengakibatkan ketidakseimbangan stok. Untuk mengatasi ini, PilihanKu mengembangkan prosedur pasokan ulang berbasis konsumsi disertai perangkat Excel yang dilengkapi dengan formula terstandar untuk menghitung jumlah pasokan ulang dan mendukung keputusan untuk alokasi. Evaluasi akhir menemukan bahwa provinsi dan kabupaten yang mematuhi prosedur ini juga mengalami perbaikan manajemen inventaris. Untuk melengkapi sistem manajemen inventaris ini, PilihanKu menerapkan jadwal distribusi standar yang berdampak positif pada ketersediaan alokon.

Distribusi

55% dari fasyankes melaporkan bahwa prosedur distribusi saat ini adalah tiap dua bulan, tapi hanya 38% dari fasyankes yang mengatakan sungguh menerima pasokan sesuai jadwal. Analisis *stockout* dibandingkan dengan frekuensi distribusi mengindikasikan bahwa ketika produk didistribusikan sesuai jadwal, tingkat *stockout* menurun. Saat penyelenggaraan lokakarya kualitatif peserta mengakui bahwa fungsi sistem manajemen inventaris yang terbaik adalah ketika jadwal distribusi dipatuhi sesuai yang tercantum dalam SOP.

Ringkasan Temuan

Sistem Informasi Manajemen Logistik

BKKBN memiliki SIM-LOG yang kuat, tapi masalah kualitas data yang telah berlangsung lama menghambat pemanfaatan data. Saat *baseline* hanya 26% dari semua fasyankes yang dijadikan sampel memiliki catatan stok yang tepat. Pada *endline* persentasenya telah meningkat menjadi 83%. Akurasi kartu stok juga menunjukkan perbaikan yang signifikan dari 36% saat *baseline* menjadi 61% di *endline*. Hasil evaluasi *endline* menunjukkan bahwa fasyankes yang menggunakan kartu stok dan memperbaruinya secara akurat lebih jarang mengalami *stockout*.

Penyimpanan

Pada *baseline* 89% fasyankes memenuhi minimal 70% dari persyaratan utama penyimpanan; di *endline* persentasenya telah meningkat menjadi 94%. Perbaikan terbesar ada pada kepatuhan terhadap prosedur *First to Expire, First Out* yang meningkat dari 56% menjadi 80% dari fasyankes. Persentase fasyankes dengan alat pemantau suhu juga meningkat dari 11% di awal menjadi 42% di *endline*. Pengamatan suhu menemukan bahwa kisaran suhu di sebagian besar fasyankes sudah sesuai dengan yang disarankan, baik saat *baseline* (92%) maupun *endline* (95%).

Monitoring & Bimtek/Supervisi

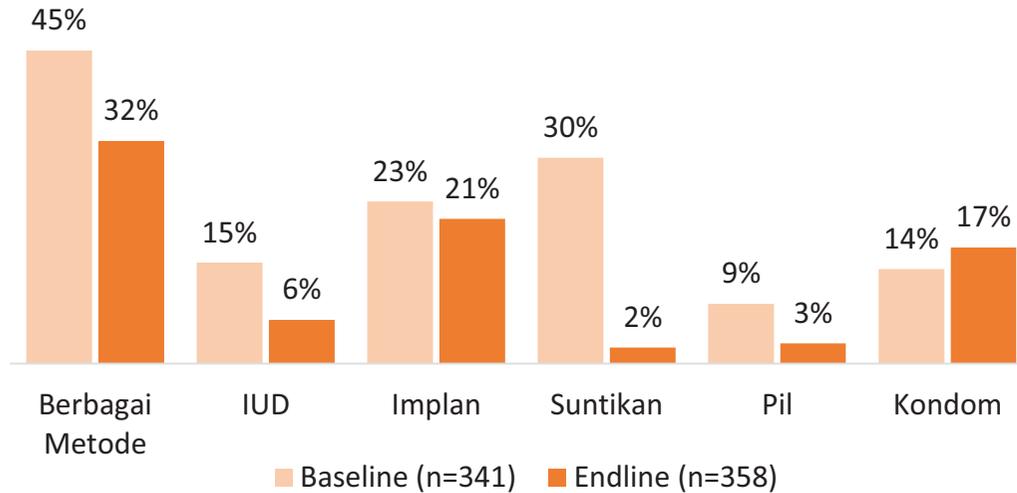
Untuk mengatasi masalah koordinasi dan keterbatasan dalam keterampilan, PilihanKu memperkuat kapasitas organisasi melalui pendampingan yang ditingkatkan dan tim peningkatan kualitas. Rapat Tim Peningkatan Kualitas 61% terlaksana dari total jumlah pertemuan yang diharapkan, tapi mereka berhasil mengatasi ketidakseimbangan stok dan kualitas data yang buruk melalui kajian data di MIM tool. Terkait dengan pendampingan, saat *baseline*, hanya 58% dari fasyankes dan Gudang mengaku menerima bimbingan teknis yang mencakup keluarga berencana atau manajemen rantai pasok. Sedangkan pada *endline* persentasenya telah meningkat menjadi 87% dan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas data serta perbaikan praktik pengelolaan rantai pasok secara keseluruhan.

47%

Penurunan jumlah fasyankes yang mengalami *stockout* *

*Rata-rata dari semua metode

Gambar 2: Persentase fasyankes yg mengalami *stockout* di hari evaluasi

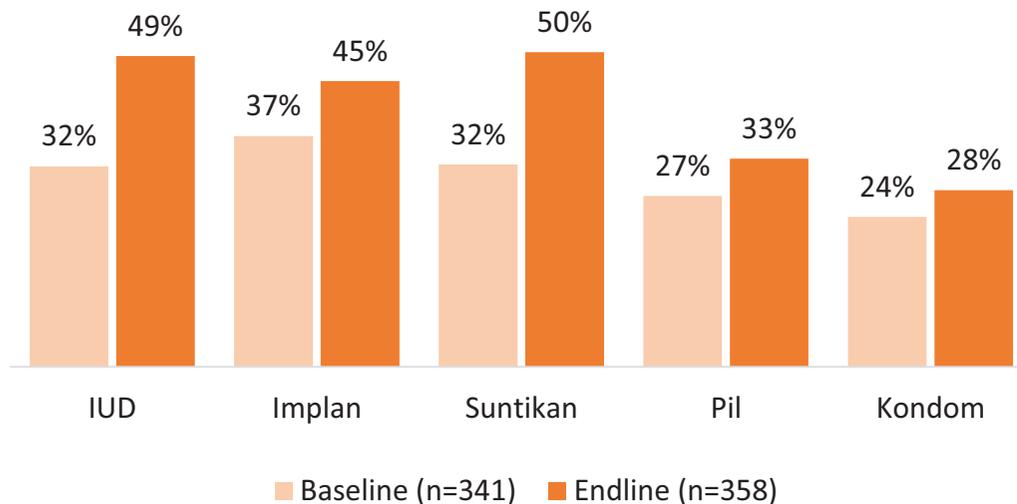


Gambar 3: Persentase fasyankes dengan stok memadai (0,5 - 5 bulan) di hari evaluasi

37%

Penambahan jumlah fasyankes dengan stok memadai *

* Rata-rata dari semua metode



15%

Pengurangan jumlah fasyankes yang mengalami *stockout* *

21%

Peningkatan jumlah fasyankes dengan stok memadai *

* Rerata dari semua metode

Gambar 4: Kab/Kota PilihanKu vs. lokasi lain di Indonesia



235%

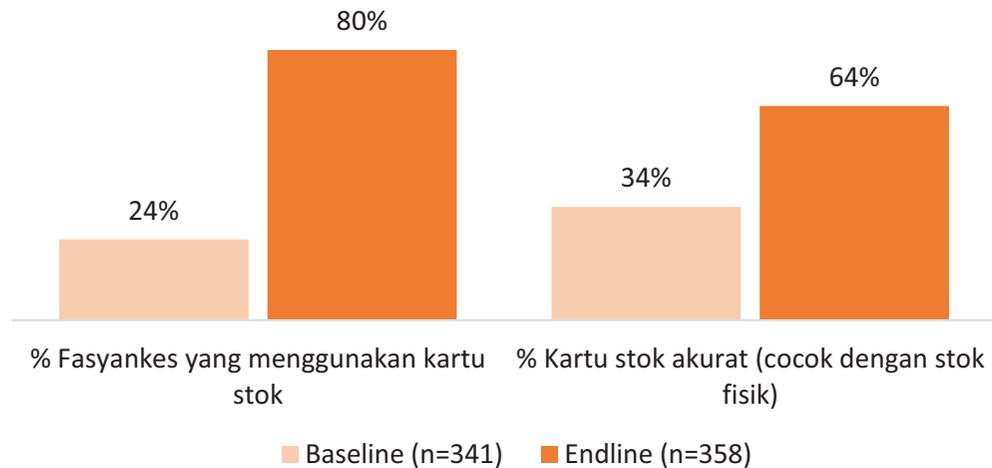
Peningkatan jumlah fasyankes yang menggunakan kartu stok

89%

Peningkatan jumlah kartu stok yang akurat *

*hasil hitung fisik cocok

Gambar 5: Penggunaan dan akurasi kartu stok di fasyankes



Rekomendasi

Temuan proyek menekankan perlunya kolaborasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan di semua tingkat rantai pasok KB sebagai cara untuk mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok. Data logistik juga perlu digunakan dengan lebih baik sehingga dapat memandu pengambilan keputusan. Rekomendasi PilihanKu adalah agar hal-hal berikut ini dipertahankan dan ditingkatkan:

Kuantifikasi & Pengadaan

BKKBN Pusat perlu terus menggunakan berbagai sumber data untuk membuat perkiraan (*forecast*) dan menggunakan parameter terstandar untuk menghitung jumlah yang perlu dipasok ke tiap provinsi. Tingkat Pusat perlu memantau tingkat ketersediaan (stok rasio) di tiap provinsi secara teratur dan menerapkan prosedur standar (*SOP*) untuk memberi pasokan darurat dan melakukan realokasi antar provinsi untuk memperbaiki ketidakseimbangan stok. Selain itu, disarankan agar dialokasikan dana yang memadai untuk melakukan distribusi pasokan darurat dan realokasi secara tepat waktu.

Manajemen Inventaris

Sistem kontrol inventaris berbasis konsumsi yang telah diterapkan di daerah lokasi proyek perlu diperkuat melalui pelatihan, monitoring dan supervisi di provinsi yang telah menerapkan intervensi dan juga provinsi perluasan. Supervisor perlu memastikan bahwa semua petugas yang mengelola alokon memiliki pedoman yang tepat, instruksi kerja dan alat bantu pasokan ulang yang dapat menjadi rujukan saat melakukan tugas manajemen inventaris mereka. Selain itu, disarankan agar alat bantu manajemen dan pemantauan inventaris berbasis web (*MIM tool*) dipakai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar sistem kontrol inventaris min maks standar dapat diberlakukan sehingga mengurangi ketidakseimbangan stok di gudang kabupaten/kota dan fasyankes.

Distribusi

Pelaksanaan sistem manajemen inventaris yang baik mengikuti jadwal distribusi yang tetap yang harus dipatuhi. Tanpa itu, sistem tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Semua titik pasokan ulang disarankan mematuhi jadwal distribusi rutin agar pasokan ulang dapat dijamin tepat waktu. Selain itu, jadwal distribusi bergilir disarankan untuk mengoptimal rute perjalanan untuk mengurangi beban kerja petugas distribusi sekaligus mengoptimalkan penggunaan dana distribusi. Terakhir, disarankan agar BKKBN mensosialisasikan dengan tepat panduan penggunaan dana alokasi khusus (*DAK*) yang ada di kab/kota untuk biaya transportasi dan distribusi alokon, juga memastikan bahwa dana dapat diakses dan digunakan.

Rekomendasi

Sistem Informasi Manajemen Logistik

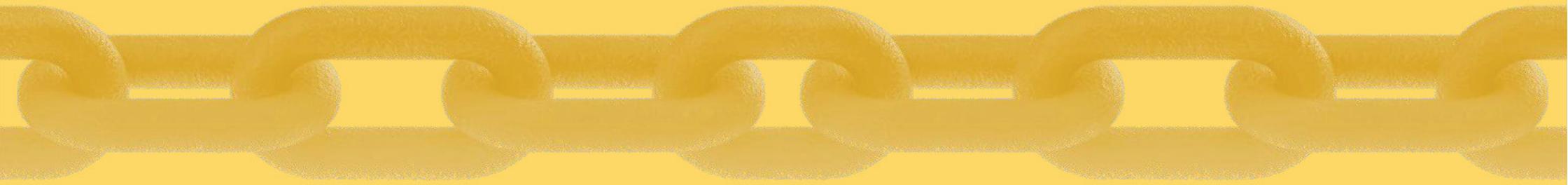
Agar sistem rantai pasok dapat berjalan efisien, perlu tersedia data berkualitas yang dapat digunakan. Disarankan agar semua tingkat menganggarkan secara memadai kebutuhan untuk melatih dan mendampingi petugas dalam pencatatan stok secara tepat serta dalam pentingnya penggunaan data untuk pelaporan dan pengambilan keputusan pasokan ulang. Ini dapat didukung melalui alat bantu dan referensi yang memadai seperti kartu stok dan instruksi kerja. Terakhir, disarankan agar sistem informasi manajemen gudang dibuat digital untuk menciptakan efisiensi, memperbaiki tingkat pelaporan dan kualitas data.

Penyimpanan

Disarankan agar dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk memastikan praktik terbaik dalam penyimpanan dilaksanakan seperti misalnya prosedur *First to Expire*, *First Out*, dan pemantauan suhu secara benar. PilihanKu mengembangkan poster yang memberi panduan mengenai praktik penyimpanan yang baik di gudang dan fasyankes. Disarankan agar sumber informasi ini disebarluaskan secara luas agar pengguna memiliki pengetahuan yang tepat mengenai penyimpanan. Terakhir, disarankan juga untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk memperbaiki infrastruktur penyimpanan agar faskes dapat menyimpan tingkat stok yang memadai dengan tepat.

Monitoring & Supervisi

Implementasi mekanisme monitoring yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa tenaga kerja rantai pasok mematuhi *SOP* yang diberlakukan. Disarankan agar Tim Peningkatan Kualitas dilembagakan di semua tingkatan untuk menggunakan data dalam pengambilan keputusan dan memastikan koordinasi yang baik antar bidang/bagian yang berbeda. Kunjungan bimtek rutin perlu direncanakan dan dianggarkan dalam anggaran kab/kota tahunan. Untuk optimalisasi sumber daya, kab/kota mungkin dapat mempertimbangkan menggabungkan kunjungan bimtek bersama distribusi. Group *WhatsApp* perlu dibentuk dan dipakai untuk mendorong koordinasi yang lebih baik dan komunikasi antar semua tingkat.



Metodologi

Tujuan

Tujuan utama dari *endline assessment* ini adalah untuk mengukur dampak dari intervensi penguatan sistem rantai pasok yang diterapkan di daerah lokasi proyek. Hasil penilaian ini dipakai untuk:

- Memberi BKKBN, JSI, dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia sebuah analisis mengenai situasi sistem rantai pasok untuk alokon di semua tingkat di provinsi lokasi proyek.
- Membandingkan kinerja rantai pasok di awal dan akhir proyek untuk melihat dampak dari intervensi penguatan rantai pasok yang dilakukan proyek PilihanKu.
- Merumuskan pembelajaran yang dapat dipetik, dan menyediakan bukti untuk penyusunan rancangan kebijakan di bidang rantai pasok.
- Memberi informasi untuk pengambilan keputusan mengenai perluasan intervensi penguatan rantai pasok ke daerah lain.

Penilaian ini mengukur ketersediaan produk dan kinerja rantai pasok secara keseluruhan untuk produk alokon milik BKKBN. Penilaian ini terdiri dari komponen kuantitatif berbasis faskes dan komponen kualitatif yang dilaksanakan secara berjenjang.

Studi dirancang berdasarkan pendekatan sebelum-dan-setelah. Efek dari intervensi program terhadap indikator kinerja utama rantai pasok diukur menggunakan kombinasi metode. Untuk data awal, dilaksanakan penilaian sistem logistik (*Logistics System Assessment Tool* - LSAT) di ke-11 kabupaten/kota dan empat provinsi program. Selain itu, dilaksanakan juga penilaian indikator logistik (*Logistics Indicator Assessment Tool* - LIAT) berbasis faskes di beberapa faskes dan gudang KB tertentu di lokasi program. LIAT dilaksanakan di *baseline* maupun *endline*.



Pelaksanaan penghitungan fisik saat pengumpulan data kuantitatif

Rancangan Asesmen Kuantitatif

Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan *LIAT* yang diadaptasikan ke dalam situasi di Indonesia, dengan penambahan beberapa pertanyaan yang khusus berkaitan dengan intervensi PilihanKu. Asesmen mencakup wawancara dengan petugas utama pengelola alokon di tempat kerja mereka, penghitungan fisik dari stok alokon yang ada, kajian catatan dan laporan logistik, serta pengamatan kondisi penyimpanan alokon. Data dicatat menggunakan perangkat *mobile* dengan piranti lunak *Open Data Kit (ODK)* pada *baseline* dan Survei CTO pada *endline*. Pengumpulan data pada *endline* dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia.

Kerangka sampling mencakup fasilitas kesehatan (yaitu puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta, serta klinik swasta), gudang KB di empat provinsi dan sebelas kabupaten/kota lokasi proyek yang menerima alokon dari BKKBN dalam 12 bulan terakhir. Konstruksi sampel memungkinkan deteksi perubahan minimal sebesar 10% pada indikator apapun, dengan *power* sebesar 0,8 dan *alpha* dua sisi (*two-sided*) 0.05. Studi dirancang sedemikian rupa agar hasil mewakili tiap jenis faskes yang ada di kabupaten/kota lokasi proyek. Faskes dipilih secara acak menggunakan metode *probability-proportionate-to-size* untuk kab/kota. *Baseline* asesmen mencakup 341 fasyankes, sementara *endline* asesmen melibatkan 358 fasyankes. Rincian sampling fasyankes ada di tabel di bawah ini

Gambar 6: Sampel fasyankes yang terdaftar di BKKBN

Provinsi	Kab/Kota	Puskesmas		Rumah Sakit		Klinik Swasta		Total	
		Baseline	Endline	Baseline	Endline	Baseline	Endline	Baseline	Endline
Jawa Tengah	Brebes	19	20	2	2	1	2	22	24
	Cilacap	17	20	3	3	7	6	27	29
	Klaten	17	17	1	4	27	21	45	42
Sumatera Utara	Asahan	13	15	2	2	9	4	24	21
	Deli Serdang	17	18	1	1	6	15	24	34
	Medan	19	19	7	7	24	8	50	34
Sulawesi Selatan	Bulukumba	11	10	1	1	0	0	12	11
	Gowa	13	16	0	2	3	0	16	18
	Makassar	24	25	12	9	7	10	43	44
DKI Jakarta	Jakarta Timur	41	46	4	10	6	9	51	65
	Jakarta Utara	26	25	0	5	1	6	27	36
Total Fasyankes		217	231	33	46	91	81	341	358

Rancangan Asesmen Kualitatif

Asesmen *baseline* menggunakan LSAT yang diadaptasikan untuk program PilihanKu. Kuesioner asesmen mencakup beberapa komponen sistem manajemen rantai pasok termasuk pengadaan dan kuantifikasi, sistem informasi manajemen logistik (SIM-LOG), manajemen inventaris, penyimpanan dan distribusi, serta organisasi dan petugas. Data diambil secara elektronik menggunakan perangkat berbasis web dalam lokakarya sehari di tiap provinsi dan kab/kota. Peserta terdiri dari wakil BKKBN Pusat dan Provinsi, OPD KB di kab/kota dan kecamatan, serta petugas penyedia layanan di sektor publik maupun swasta.

Pada asesmen *endline*, diselenggarakan lokakarya asesmen kualitatif bersamaan dengan kegiatan validasi data kuantitatif. Lokakarya diadakan di masing-masing dari ke-4 provinsi dengan pemangku kepentingan dari provinsi dan ke-11 kab/kota lokasi proyek. Tujuan lokakarya adalah:

- Diseminasi dan validasi hasil asesmen *endline* kuantitatif.
- Membandingkan kinerja *endline* dengan kinerja *baseline* dan mengidentifikasi perubahan dalam kinerja rantai pasok.
- Mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi selama implementasi intervensi penguatan rantai pasok.
- Merumuskan pembelajaran yang dapat dipetik untuk diterapkan dalam implementasi intervensi saat ini dan di masa mendatang.
- Menyusun rencana untuk mengatasi tantangan yang ada, memperkuat implementasi intervensi rantai pasok dan memastikan kesinambungan kegiatan.



Lokakarya asesmen kualitatif di Jawa Tengah

Pemantapan Mutu

Untuk menjamin kualitas data yang diperoleh, diterapkan beberapa mekanisme pemantapan mutu. Ini mencakup inventarisasi data yang masuk oleh staf UI yang memeriksa bahwa tiap fasyankes telah mengumpulkan tiga jenis formulir, serta melakukan transformasi data seperlunya untuk menjajarkan dan memastikan data ada di format yang tepat. Tim JSI melakukan pembersihan data sesuai protokol yang telah disusun lalu membagikan temuan mereka dengan UI untuk ditindaklanjuti.

Perubahan data yang diperlukan bervariasi tapi terutama terkait dengan masalah di pola loncatan (*skip pattern*) atau kesalahan dalam entri data. UI diingatkan untuk menjelaskan kepada pengumpul data arti dari beberapa pertanyaan berkaitan dengan beberapa isu yang ditemui saat pembersihan data. Ini turut memastikan kualitas data, yang juga didapat melalui penggunaan perangkat *mobile* untuk pengumpulan data di mana pola loncatan dan persyaratan pertanyaan dapat diprogram sebelumnya. Pengumpulan data melalui perangkat *mobile* juga memungkinkan UI dan JSI untuk langsung mengkaji data yang masuk, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan meningkatkan kemungkinan pengumpulan data yang berkualitas.



Pengumpulan data pilot oleh pengumpul data UI

Tantangan dan Keterbatasan

Asesmen menghadapi beberapa tantangan dan keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

- ❖ Beberapa faskes terpilih saat penilaian *baseline* maupun *endline* tidak dapat dikunjungi karena tidak terjangkau, telah tutup, berada di lokasi yang tidak diketahui, dan/atau perizinan untuk mengunjungi faskes tidak diperoleh. Untuk mengatasinya dipilih fasilitas pengganti yang memiliki ciri-ciri yang mirip, tapi masih tetap perlu dipertimbangkan bahwa faskes yang tidak dapat diakses tersebut mungkin memiliki ciri kinerja rantai pasok yang berbeda terkait dengan kondisi mereka yang terpencil dan sulit diakses.
- ❖ Saat pengumpulan *baseline*, daftar faskes yang lengkap dan akurat belum tersedia, sehingga terjadi kesalahan dalam klasifikasi beberapa faskes. Ini diperbaiki sebaik mungkin saat pengumpulan data *endline*, tapi situasi ini tetap perlu menjadi pertimbangan saat membandingkan rumah sakit pemerintah dan swasta dari data *baseline* dan *endline*.
- ❖ Studi ini dirancang untuk mewakili jenis faskes yang ada di kabupaten/kota lokasi program, dan tidak dapat mewakili kondisi di provinsi ataupun kabupaten/kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, interpretasi dari data yang dipilah dengan cara demikian perlu dilakukan dengan hati-hati.
- ❖ Saat pengumpulan data *baseline*, perizinan untuk melakukan studi di DKI Jakarta baru belakangan diperoleh, dibandingkan perizinan di provinsi lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena proses nota kesepahaman antara proyek dengan DKI Jakarta. Pengumpulan data *baseline* di DKI Jakarta dilakukan di bulan November 2015, beberapa bulan setelah pengumpulan data di provinsi lainnya.



Pengumpulan data kuantitatif – evaluasi

Kerangka Hasil

Rancangan asesmen dan pendekatan proyek secara keseluruhan didasarkan pada model Teori Perubahan (*Theory of Change - TOC*) yang spesifik untuk proyek. Model ini memetakan jalur kausal yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan ketersediaan alokon; berdasarkan model ini dikembangkan indikator, perangkat asesmen, dan pendekatan untuk pemantauan kinerja, juga daftar indikator untuk mengukur ketersediaan produk dan kinerja rantai pasok secara keseluruhan. Pemantau hasil (*results tracker*) PilihanKu adalah bagian dari daftar indikator ini.

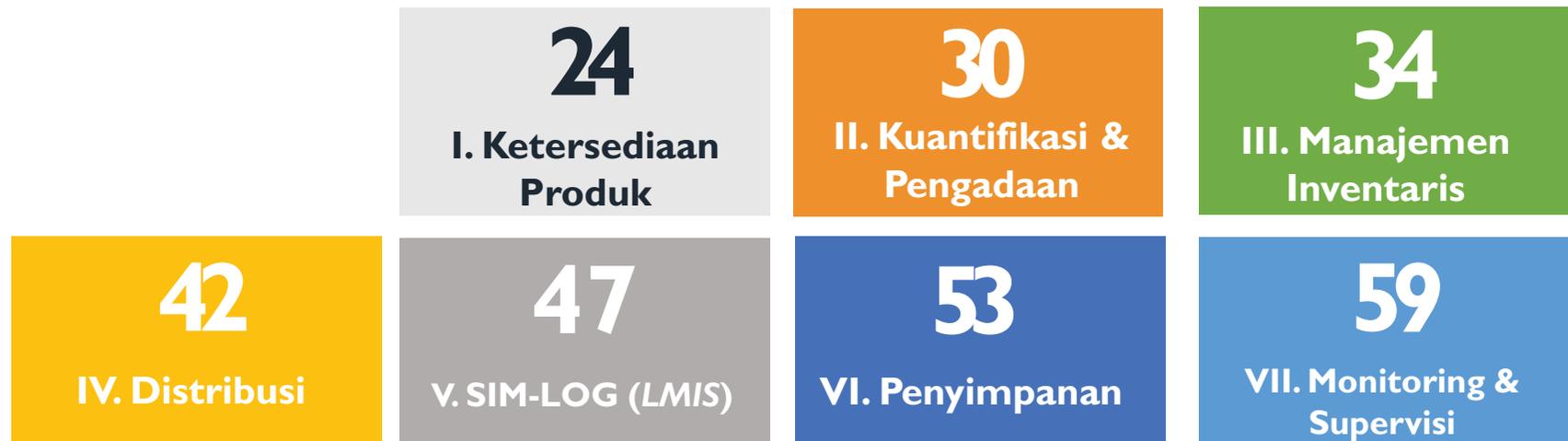
Target Tercapai

Target Tidak Tercapai

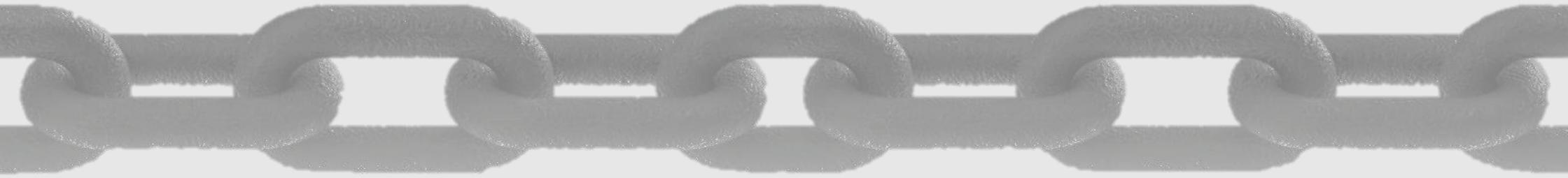
Gambar 7: results tracker PilihanKu

Keluaran	Indikator	Produk	Fasilitas Pelayanan Kesehatan BL (n=341), EL (n=358)			Gudang Kabupaten/Kota (n=11)			Gudang Provinsi (n=4)			
			Baseline	Target	Endline	Baseline	Target	Endline	Baseline	Target	Endline	
Meningkatkan ketersediaan kontrasepsi dari berbagai metode BKKBN di fasilitas pelayanan kesehatan yang teregistrasi oleh BKKBN	% fasilitas yang mengalami stok out untuk produk BKKBN, pada saat asesmen	Berbagai Metode	45%	30%	32%	55%	0%	37%	75%	0%	25%	
		IUD	15%	10%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implant	23%	16%	21%	0%	0%	9%	25%	0%	0%	
		Suntikan	30%	20%	2%	46%	0%	0%	25%	0%	0%	
		Pil	9%	6%	3%	9%	0%	0%	25%	0%	0%	
Pengembangan dan penggunaan pencatatan dan pelaporan logistik yang benar	% fasilitas yang menggunakan kartu stok untuk berbagai metode yang ditawarkan	Kondom	24%	52%	81%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	
			% kartu stok yang akurat (saldo akhir cocok dengan stok fisik)	34%	45%	64%	55%	73%	66%	55%	73%	37%
			Jumlah staf fasilitas yang dilatih mengenai pencatatan logistik (dengan dukungan proyek)	0	550	652	0	110	110	0	40	40
Peningkatan perkiraan, manajemen inventaris, rencana distribusi dan pemantauan/ peningkatan kinerja	% fasilitas dengan tingkatan stok yang sesuai Fasyankes - 0.5 - 5 bulan stok Gudang Kabupaten/Kota - 1.5 - 8 bulan stok Gudang Provinsi - 3 - 22 bulan stok"	IUD	32%	42%	49%	64%	84%	55%	100%	100%	0%	
		Implant	37%	49%	45%	64%	84%	46%	50%	66%	25%	
		Injectable	32%	43%	50%	18%	24%	46%	25%	33%	0%	
		Pill	27%	36%	33%	18%	24%	46%	25%	33%	0%	
Meningkatkan penggunaan data logistik untuk peningkatan kinerja manajemen inventaris atau rantai pasok	Jumlah staf fasilitas yang dilatih (dengan dukungan proyek) dalam menggunakan data logistik untuk meningkatkan kinerja manajemen inventaris atau rantai pasok	Kondom	24%	32%	28%	27%	36%	27%	25%	33%	25%	
			Jumlah provisi dan kabupaten/kota dengan pengembangan peningkatan kualitas yang terstruktur	0	550	652	0	110	110	0	40	40
			N/A	N/A	N/A	0	11	11	0	4	4	

Temuan dan Rekomendasi



Temuan dan rekomendasi yang tertuang dalam laporan ini didasarkan pada pengamatan dan pendapat dari responden serta tim evaluasi. Asesmen berfokus hanya pada alokon BKKBN yang mengalir masuk dalam sistem dan tidak mencakup alokon yang berasal dari sumber lain. Banyak dari temuan berasal dari informasi yang diberikan responden dengan pengetahuan, pendapat, kebenaran dan bias yang berbeda-beda. Kejujuran dalam menjawab juga bervariasi antar provinsi, yang dikenal memiliki beragam sudut pandang atas studi. Selain itu, beberapa temuan (misalnya mengenai kondisi penyimpanan) didasarkan pada pengamatan dan interpretasi pengumpul data yang juga dapat bervariasi. Temuan di tingkat provinsi tidaklah mewakili provinsi secara keseluruhan, tapi hanya menggambarkan situasi yang ada di kabupaten/kota terpilih dalam provinsi yang bersangkutan. Hasil evaluasi dapat mewakili proyek secara keseluruhan, tapi tidak dapat mewakili keseluruhan tingkat provinsi ataupun kab/kota. Jumlah responden untuk tiap data kuantitatif dituliskan sebagai 'n' dalam tiap grafik dan jumlahnya berbeda-beda terkait dengan apakah pertanyaan tersebut berlaku atau tidak berlaku bagi responden tersebut.

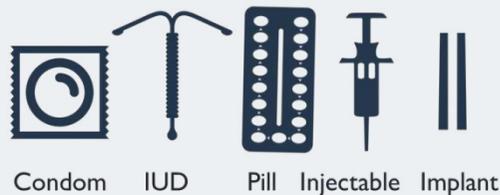


I. Ketersediaan Produk

Temuan

Sebuah slogan yang populer di dunia kesehatan masyarakat adalah **“Tidak ada produk, tidak ada layanan.”** Akseptor KB harus memiliki akses terhadap pilihan kontrasepsi mereka di saat mereka membutuhkannya. Untuk itu perlu ada sistem rantai pasok yang kuat dan dinamis yang dapat menjamin ketersediaan alokon dalam jumlah memadai di fasyankes dan titik pasokan ulang setiap saat.

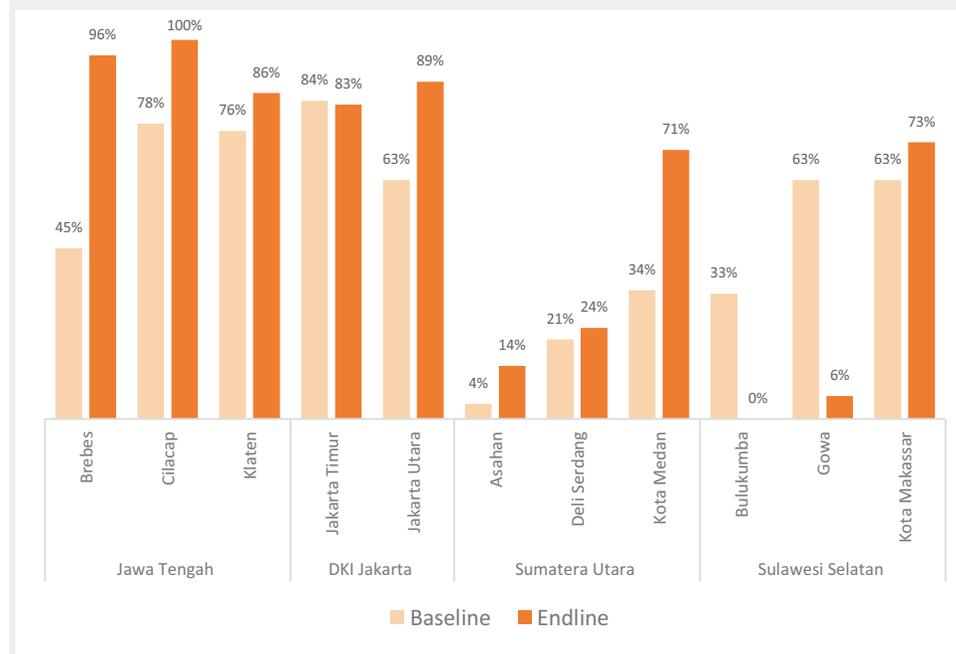
Ketersediaan alokon di gudang provinsi, kab/kota dan fasyankes dievaluasi melalui penghitungan fisik dari lima alokon yang disediakan BKKBN (lihat di bawah ini). Untuk tiap alokon BKKBN ini, fasyankes diminta menyebutkan metode KB apa yang mereka berikan sebagai bagian dari kebijakan mereka. Bila fasyankes memberikan layanan sebuah metode tapi pada saat evaluasi, metode tersebut secara fisik tidak tersedia, maka faskes dianggap mengalami *stock out* untuk alokon tersebut.



Sesuai judul proyek, salah satu indikator utama dari program KB yang kuat adalah bahwa fasyankes memiliki menu pilihan metode KB bagi akseptor. Pengguna KB berhak memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan mereka, dan bukan disesuaikan dengan ketersediaan produk.

Evaluasi menunjukkan perbaikan signifikan dalam jumlah faskes yang pada hari evaluasi memiliki stok untuk semua metode KB yang mereka tawarkan; dari hanya 55% pada *baseline*, menjadi 68% di *endline*, yang berarti kenaikan sebesar 22%. Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah – dari 45% di *baseline* menjadi 96% di *endline*, juga di Kabupaten Cilacap dengan 100% ketersediaan semua metode KB. Ketiga kabupaten di Sumatera Utara yang di *baseline* memiliki kinerja rendah telah menunjukkan perbaikan dalam tingkat ketersediaan stok, dari rata-rata 22% menjadi 33% pada *endline*. Di Sulawesi Selatan, kabupaten/kota tidak dapat memberi metode KB secara lengkap karena kekosongan stok kondom dalam jumlah besar di semua tingkat di provinsi Sulsel. Akan tetapi ketersediaan produk lain seperti IUD dan KB suntik menunjukkan perbaikan. Secara keseluruhan, 8 dari 11 kab/kota menunjukkan peningkatan kinerja relatif terhadap kondisi di *baseline*.

Gambar 8: Persentase fasyankes yang memiliki stok semua metode KB yang mereka tawarkan di hari kab/kota melakukan kunjungan



Temuan

Untuk tingkat fasyankes, klinik swasta menunjukkan perbaikan terbesar dalam tingkat ketersediaan alokon yaitu dari 48% menjadi 69%, sedangkan di Puskesmas peningkatan adalah dari 57% menjadi 60%. Rumah sakit tidak menunjukkan perubahan yang berarti, di mana tingkat ketersediaan alokon justru sedikit menurun dari 64% menjadi 63%.

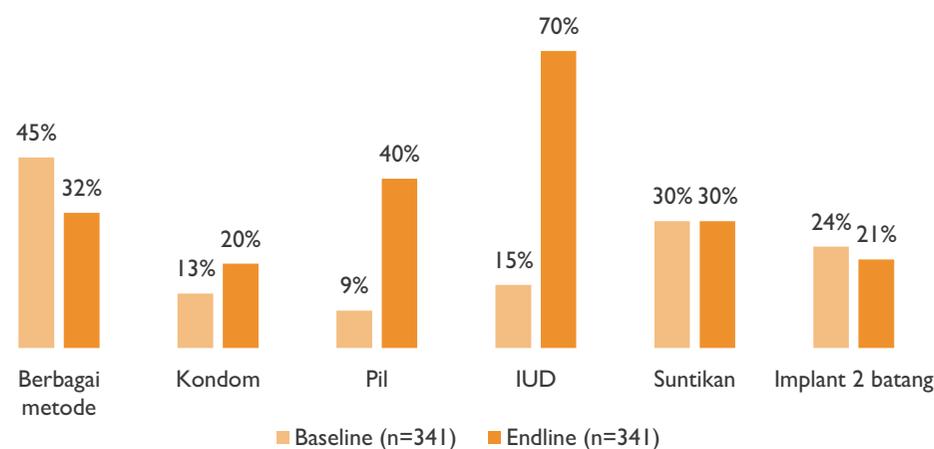
Walaupun 32% dari faskes pada hari evaluasi tidak memiliki stok kelima metode KB secara lengkap, tapi 99% dari fasyankes memiliki stok setidaknya satu metode jangka pendek, dan 96% dari fasyankes memiliki stok setidaknya satu metode jangka panjang.



Gambar 9 menunjukkan tingkat ketersediaan dari tiap metode KB. Terlihat adanya penurunan yang signifikan dari tingkat *stockout* untuk semua metode, kecuali kondom dan implan. Tingkat *stockout* untuk berbagai metode (*any method stock out*) di fasyankes menurun sebesar 28% (45% menjadi 32%). Suntik sebagai metode yang banyak dicari akseptor, tingkat *stockout*-nya di fasyankes pada *baseline* sebesar 30%, pada *endline* telah menurun hingga hanya 3%. Tingkat *stockout* untuk implan berkurang sedikit dari 24% pada *baseline* menjadi 21% pada *endline*. Ini disebabkan adanya keterlambatan pengadaan di tingkat pusat, sehingga stok di gudang provinsi dan kab/kota tidak lagi memadai. Demikian halnya dengan kondom yang mengalami *stockout* karena kejadian kedaluwarsa sejumlah besar kondom dan pengadaan yang tidak memadai oleh tingkat pusat. Ini mengakibatkan tingkat *stockout* kondom meningkat dari 13% di *baseline* menjadi 20% di *endline*.

Dari 11 gudang kab/kota yang dievaluasi, 8 di antaranya memiliki stok lengkap dari kelima metode KB di hari dilakukan evaluasi, sementara 3 kab/kota di Sulawesi Selatan mengalami kekosongan stok kondom. Gudang provinsi menunjukkan tren yang sama di mana stok tersedia untuk semua metode kecuali kondom di Sulawesi Selatan.

Gambar 9: Persentase fasyankes yang mengalami *stockout*, berdasarkan metode di hari kunjungan



* Perubahan signifikan antara *baseline* dan *endline*

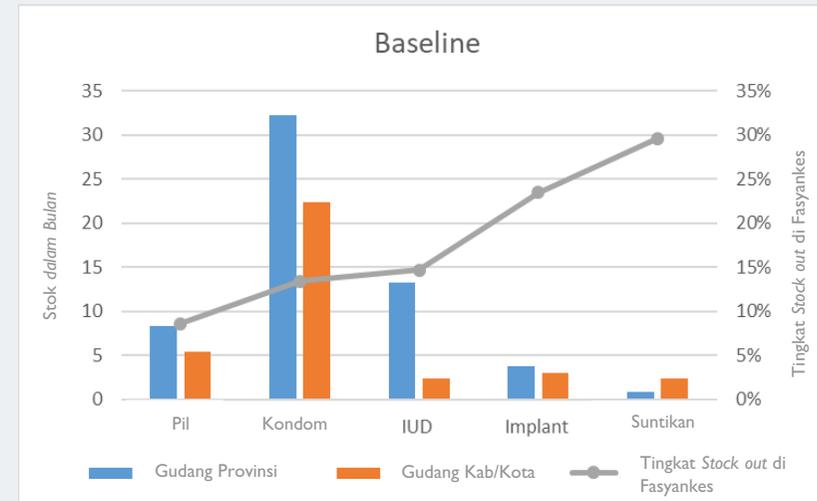
Temuan

Salah satu alasan terjadinya *stock out* di fasyankes adalah tingkat stok di gudang kab/kota dan provinsi yang tidak memadai. Gudang menerima produk dari tingkat yang lebih tinggi dengan frekuensi yang lebih jarang – sekali setahun untuk gudang provinsi dan tiap triwulan untuk gudang kab/kota. Ketika gudang tidak bisa mempertahankan tingkat stok yang memadai setiap saat, maka mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan fasyankes dibawahnya tepat waktu, yang mengakibatkan terjadinya *stockout* di fasyankes.

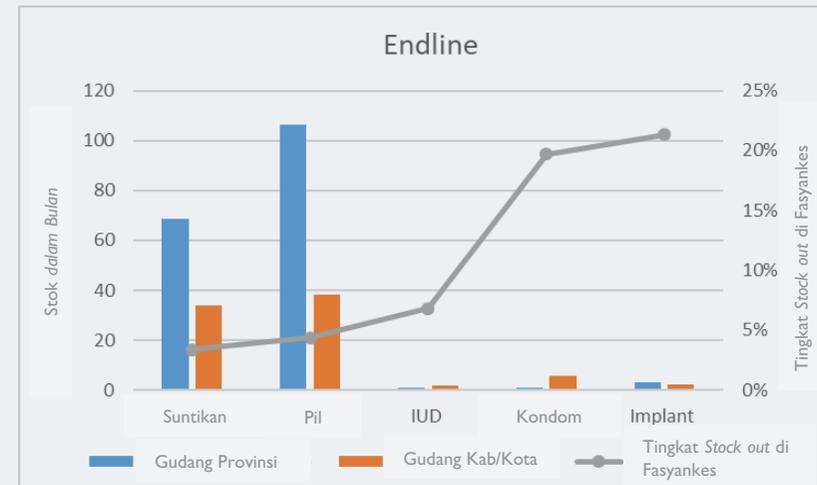
Gambar 10 dan 11 menunjukkan korelasi antara tingkat stok alokon di gudang dengan ketersediaan stok di fasyankes. Ketika tingkat ketersediaan stok di gudang provinsi dan kab/kota memadai, angka *stockout* di fasyankes menurun. Tren ini terlihat baik di *baseline* maupun *endline* di bawah ini.

Gudang provinsi juga terlihat tidak mempertahankan tingkat stok yang memadai untuk produk alokon apapun. Saat IUD, implan dan kondom mengalami kekosongan stok dalam jumlah besar, suntik dan pil justru memiliki stok berlebih. Ini berisiko menimbulkan sejumlah besar alokon yang kedaluwarsa di masa mendatang.

Gambar 10: Perbandingan rasio bulan ketersediaan stok saat ini di gudang dengan tingkat *stockout* di fasyankes pada *baseline*



Gambar 11: Perbandingan rasio bulan ketersediaan stok saat ini di gudang dengan tingkat *stockout* di fasyankes pada *endline*

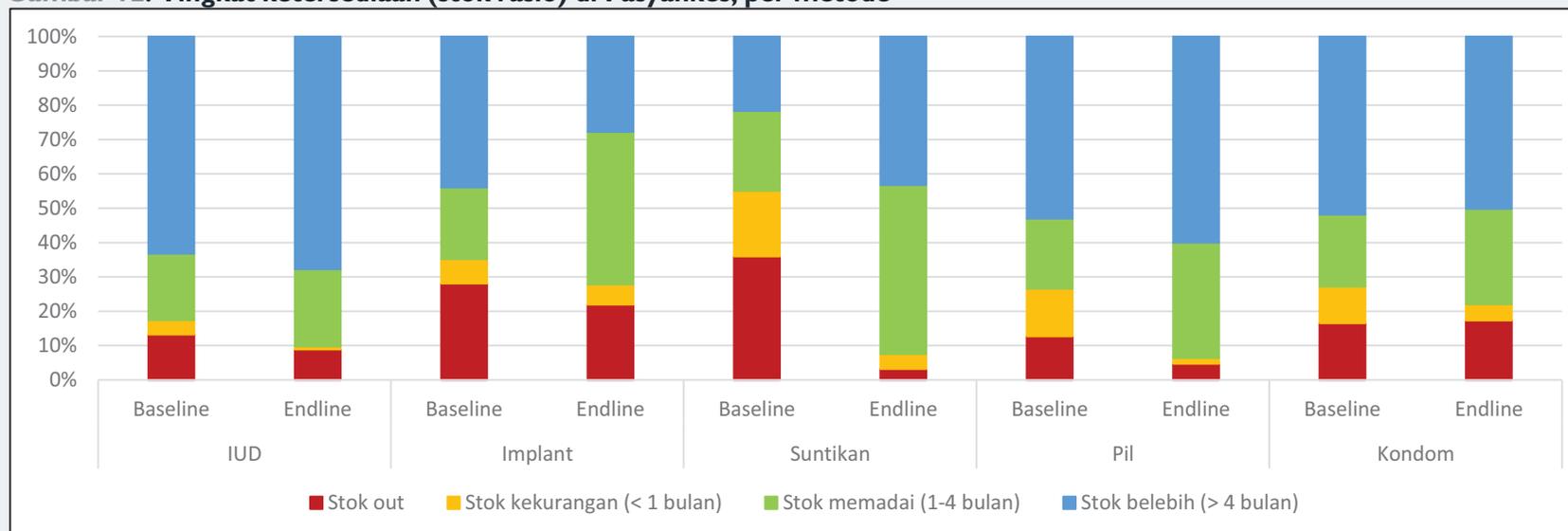


Temuan

Satu lagi indikator penting yang menggambarkan seberapa sehatnya sebuah sistem rantai pasok adalah apakah fasyankes memiliki tingkat stok yang memadai untuk kebutuhan mendatang. Gambar 12 menunjukkan apakah fasyankes dengan stok berlebih (yang oleh proyek didefinisikan sebagai tingkat ketersediaan stok sebesar 5 bulan atau lebih), stok memadai (tingkat ketersediaan stok antara 0.5 dan 5 bulan), kekurangan stok (tingkat ketersediaan stok kurang dari 0,5 bulan), atau mengalami *stockout* (habisa sama sekali). Indikator ini dihitung dari hasil hitung fisik saat kunjungan di hari asesmen dan rata-rata konsumsi bulanan (dihitung berdasarkan konsumsi yang dilaporkan fasyankes dalam eLMIS (laporan F/II/KB) dari tiga bulan terakhir sebelum kunjungan). Fasilitas yang memiliki data laporan yang diperlukan diikutsertakan dalam analisis ini.

Dalam Gambar 12 terlihat bahwa saat pengumpulan data dasar sebagian besar fasyankes memiliki stok berlebih atau kekurangan stok/*stockout* untuk alokon BKKBN, dan hanya sebagian kecil fasyankes memiliki stok memadai. Di pengumpulan data akhir, persentase fasyankes dengan tingkat stok memadai untuk semua alokon meningkat dari 30% menjadi 41%. Stok berlebih tetap merupakan masalah di mana rata-rata 45% fasyankes memiliki stok berlebih. Sistem manajemen inventaris yang efisien dapat mencegah ketidakseimbangan stok dan memastikan bahwa fasyankes diberi alokon berdasarkan pola konsumsinya masing-masing.

Gambar 12: Tingkat ketersediaan (stok rasio) di Fasyankes, per metode

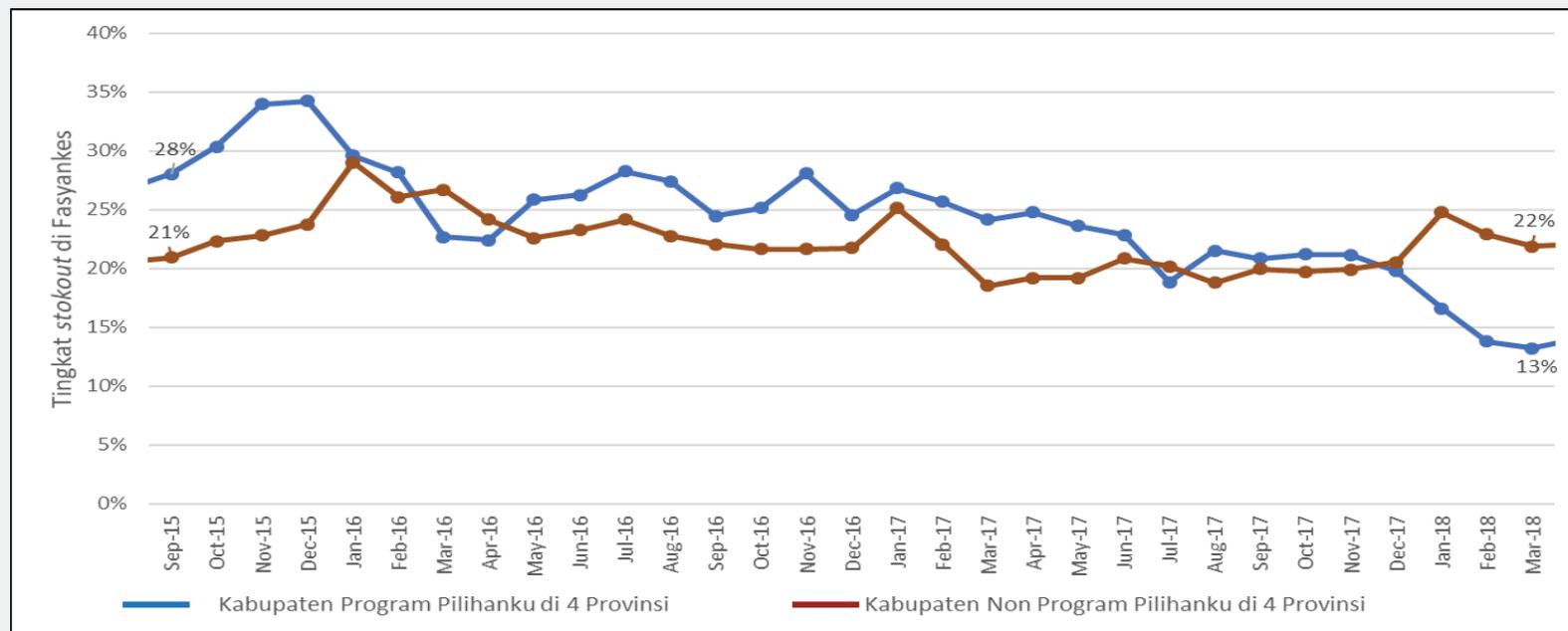


Temuan

Selain data survei, proyek juga memantau data SIM-LOG elektronik (eLMIS). Melalui MIM Tool, pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kab/kota dapat menelusuri beberapa indikator utama rantai pasok dengan menggunakan data stok bulanan yang dilaporkan ke eLMIS. Selain itu, proyek juga mengembangkan [dashboard ketersediaan alokon](#) berbasis excel yang memantau tingkat ketersediaan fasyankes di provinsi dan kab/kota di seluruh Indonesia. Dashboard tersebut memungkinkan pengguna membandingkan indikator tingkat ketersediaan antar kelompok provinsi atau antar kelompok kab/kota.

Gambar 13 di bawah ini menggambarkan perbandingan tingkat *stockout* (rerata semua metode atau *average any method*) di kab/kota di empat provinsi lokasi PilihanKu (Sumatera Utara, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan) dengan tingkat *stockout* di kab/kota non-intervensi di empat provinsi yang sama. Grafik tersebut mengilustrasikan tingkat *stockout* bulanan untuk semua metode pada *baseline* (Sep 2015) dan *endline* (Maret 2018). Dapat dilihat bahwa kinerja kab/kota intervensi PilihanKu berada jauh di atas kab/kota non-intervensi selama periode waktu tersebut. Tingkat *stockout* di kab/kota non-intervensi relatif tetap (21% di *baseline* dibandingkan dengan 22% di *endline*), sementara di kab/kota intervensi tingkat *stockout* menurun drastis; dari 28% pada *baseline* menjadi 13% di *endline*, yaitu penurunan sebesar 54%.

Gambar 13: Tingkat *stockout* di Fasyankes (rata-rata untuk semua metode)





II. Kuantifikasi & Pengadaan

Temuan

PENGADAAN

Saat *baseline* tidak satupun provinsi lokasi proyek melakukan pengadaan alokon; semua pasokan alokon diperoleh dari BKKBN Pusat. Di tahap *endline*, pengadaan masih terutama dilakukan oleh BKKBN Pusat kecuali satu kasus di Sulawesi Selatan di mana provinsi membeli kondom untuk layanan *mobile* dengan menggunakan dana operasional mereka. Ini merupakan solusi sementara karena sejumlah besar stok kondom mereka telah kedaluwarsa sementara pengadaan tahun 2016 mengalami kegagalan. Pengadaan kondom nasional tahun 2016 hanya memperoleh 75% dari seluruh jumlah yang dipesan dan Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang tidak menerima realisasi kondom. Kuantifikasi yang dilakukan tingkat pusat di tahun 2016 untuk tahun 2017 tidak memperhitungkan waktu kedaluwarsa yang pendek dari stok kondom yang tersedia. Hal ini, ditambah kegagalan pengadaan tahun 2016 mengakibatkan kekosongan stok kondom untuk seluruh Sulawesi Selatan di tahun 2018.

Sementara itu, saat pengumpulan data *baseline*, 4 dari 11 kab/kota juga melakukan pengadaan alokon setempat untuk mengantisipasi kekurangan atau keterbatasan pasokan yang diterima dari Provinsi, selain untuk memberi akseptor pilihan alokon karena jenis produk yang tersedia dari BKKBN terbatas.

Pengadaan alokon oleh kab/kota tidak berlangsung secara rutin karena mereka menggunakan anggaran setempat sehingga pengadaan tergantung pada ketersediaan dana. Di tahap *baseline* jenis produk yang diadakan secara local oleh kab/kota bervariasi, tapi umumnya adalah implant dan suntik KB bulanan, sementara suntik KB yang diberikan BKKBN Pusat adalah suntik tiga bulanan. Dibandingkan dengan *baseline*, di tahap *endline*, tidak satupun dari ke-11 kab/kota PilihanKu mengadakan alokon secara lokal.

Mulai di tahun 2018, pengadaan akan dilakukan oleh provinsi dengan jumlah yang ditetapkan oleh tingkat pusat melalui proses kuantifikasi berdasarkan Buku Referensi Kuantifikasi Alokon. Tantangan yang akan dihadapi adalah waktu pemesanan (*lead time*) yang bervariasi antar provinsi yang dapat berdampak pada ketersediaan produk. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk melihat apakah di bawah tanggung jawab provinsi proses pengadaan dapat dipercepat sehingga hasil keseluruhannya juga dapat ditingkatkan.

Rekomendasi

Perkiraan kebutuhan alokon harus didasarkan pada data konsumsi sebagai sumber data primer, dan divalidasi dengan data demografi dan layanan. Perencanaan pasokan harus didasarkan perkiraan ini beserta data alokon yang tersedia dan yang sudah dipesan dari eLMIS. Rencana pasokan ini juga perlu diperbaharui secara teratur berdasarkan jumlah konsumsi yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan konsumsi dan tingkat stok yang tersedia.

BKKBN memiliki sistem pelaporan elektronik yang sangat baik yang memuat data konsumsi dan data stok yang tersedia di fasyankes (laporan F/II/KB) dan data stok di tingkat provinsi atau kab/kota (laporan F/V/Gudang). Di awal tahun 2018 kuantifikasi dilakukan menggunakan kombinasi beberapa metode sesuai rekomendasi dari laporan baseline proyek dan Buku Referensi Kuantifikasi.

Dari sudut pandang hukum, dirasa perlu untuk mengeluarkan pedoman resmi agar praktek kuantifikasi ini dapat dilembagakan secara penuh. Untuk itu disarankan untuk melakukan revisi terhadap Perka Perencanaan Kebutuhan Kontrasepsi No. 287 tahun 2011 untuk memperkuat pelaksanaan kuantifikasi.

Dengan kantor BKKBN Provinsi yang bertanggung jawab untuk melakukan pengadaan sendiri, bila mereka dapat melakukan pengadaan tepat waktu, diikuti dengan jadwal distribusi yang tetap dari provinsi ke kab/kota, maka seharusnya tingkat di bawah akan memperoleh pasokan tepat waktu. Akan tetapi disarankan agar pusat tetap memberi dukungan teknis kepada provinsi agar daerah dipastikan memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan pengadaan tepat waktu. Kinerja provinsi perlu dipantau erat untuk mengidentifikasi mereka yang berkemampuan rendah dan memberi dukungan yang dibutuhkan.

Selain itu, rencana pasokan dan distribusi di tingkat pusat dan provinsi juga perlu ditelaah secara teratur selama tahun berjalan. Tingkat konsumsi yang sesungguhnya perlu dikaji, untuk mengantisipasi perubahan dalam konsumsi dan menyesuaikan rencana distribusi. BKKBN Pusat perlu memiliki stok penyangga (*buffer*) dengan standar baru untuk tiap alokon serta memantau tingkat ketersediaan di tiap provinsi agar dapat cepat menanggapi permintaan untuk pengiriman darurat.



Gudang Provinsi, DKI Jakarta



III. Manajemen Inventaris

Temuan

Manajemen inventaris yang baik mencakup sistem kontrol inventaris yang dapat mencegah ketidakseimbangan stok, meminimalisir kedaluwarsa, *stockout* maupun stok berlebih, and memaksimalkan ketersediaan alokon bagi akseptor. Sistem kontrol inventaris yang baik merinci kapan pengelola gudang harus memasok alokon dan berapa banyak jumlahnya berdasarkan data logistik. Sistem kontrol inventaris juga memandu bagaimana memantau tingkat stok dan mengambil tindakan untuk mencegah kekurangan dan kelebihan stok.



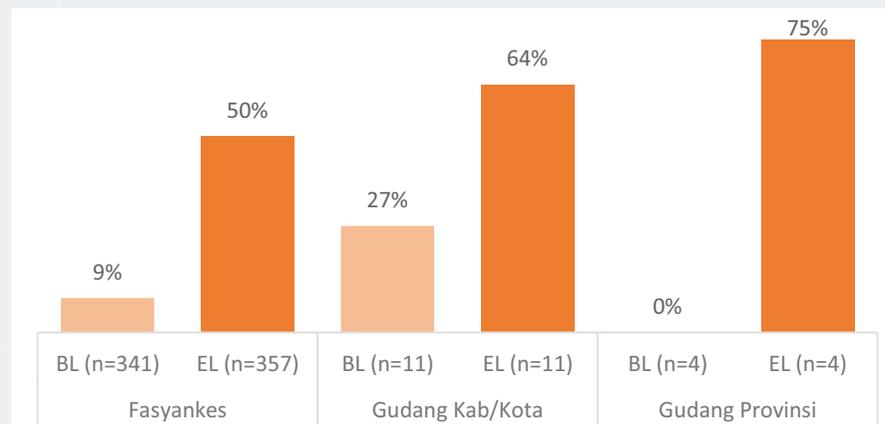
Menghitung stok IUD

Melalui dokumentasi, pelatihan dan supervisi pendukung/bimtek, PilihanKu membentuk sistem order teratur dan sistem kontrol inventaris min-maks di tingkat provinsi, kab/kota dan fasyankes. Provinsi memasok ulang kab/kota tiap triwulan dan kab/kota memasok ulang fasyankes tiap dua bulan. Ini adalah sistem *push* di mana tingkat yang memasok menghitung jumlah pasokan ulang berdasarkan data yang dilaporkan. Prosedur permintaan darurat dan realokasi diterapkan untuk tingkat-tingkat ini. Sistem kontrol inventaris ini dikelola menggunakan perangkat Manajemen dan Monitoring yang disebut MIM Tool, yang membantu pengelola memproses data serta menghitung jumlah pasokan ulang.

KETERSEDIAAN PEDOMAN/INSTRUKSI KERJA

Pedoman dan instruksi kerja (*job aid*) adalah materi pendukung bagi pengelola gudang terlatih ketika mereka perlu penyegaran pengetahuan tentang prosedur manajemen inventaris, penggunaan MIM tool, dan aspek lain dari manajemen inventaris yang baik. Materi ini bermanfaat untuk orientasi petugas baru yang belum dilatih, tapi telah ditugaskan mengelola inventaris. Seperti dapat dilihat di Gambar 14, ketika evaluasi *endline*, hampir separuh dari fasyankes yang dikunjungi memiliki materi ini, dibandingkan dengan hanya 9% ketika evaluasi *baseline*. Sebagian besar gudang provinsi dan kab/kota juga memiliki materi ini, yang merupakan perbaikan yang signifikan ($p < 0.001$).

Gambar 14: Persentase fasyankes yang memiliki pedoman/instruksi kerja berdasarkan jenis faskes



Temuan

SIAPA YANG MENENTUKAN JUMLAH PASOKAN ULANG KE FASYANKES

Satu faktor penting dalam memahami fungsi rantai pasok adalah mengetahui siapa (yaitu tingkat yang mana) yang terutama menentukan jumlah alokon yang perlu dipasok ke sebuah faskes. Bila fasilitas yang mengeluarkan alokon yang menentukan jumlah, maka itu adalah sistem *push*; bila tingkat yang menerima yang menentukan kebutuhannya, maka itu adalah sistem *pull*. Seperti disampaikan sebelumnya, sistem yang diterapkan melalui proyek PilihanKu adalah sistem *push*.

Evaluasi *baseline* mendapati bahwa daerah menerapkan kombinasi sistem *push* dan *pull* untuk menentukan jumlah pasokan ulang. Pada evaluasi *endline* telah terjadi perbaikan yang signifikan, 61% menjadi 76% ($p < 0.001$), dalam persentase faskes yang mengatakan jumlah pasokan ulang ditetapkan oleh tingkat yang lebih tinggi (sistem *push*).

“Perangkat manajemen dan monitoring inventaris (MIM Tool) membantu saya mengontrol stok di gudang kami, juga stok di fasyankes. Mekanisme titik permintaan darurat dan titik realokasi membantu kami mempertahankan stok dalam jumlah yang memadai di faskes.” PETUGAS GUDANG, KABUPATEN CILACAP, JAWA TENGAH

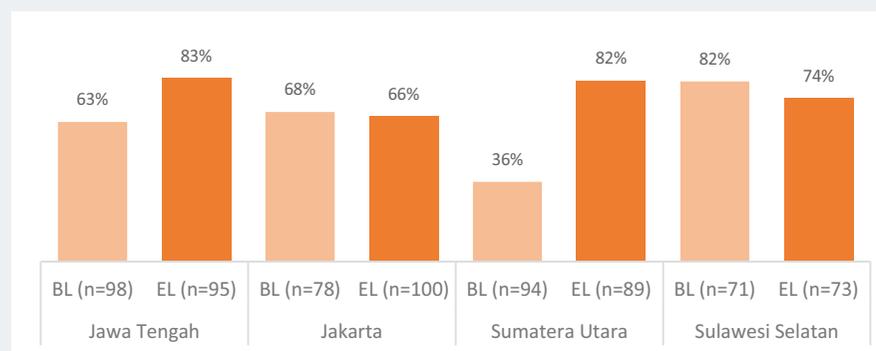
Gambar 15 menunjukkan terjadinya peningkatan dalam penggunaan sistem *push* yang diterapkan oleh PilihanKu terjadi secara konsisten di semua jenis faskes. Perbedaan yang paling signifikan terlihat di puskesmas dan fasyankes swasta, yaitu dari 66% menjadi 78% ($p = 0.01$) dan 48% menjadi 71% ($p=0.007$), berturut-turut.

Gambar 15: Persentase fasyankes yang mengatakan tingkat yang lebih tinggi menentukan jumlah alokon yang akan dipasok dibagi berdasarkan jenis fasyankes



Dari keempat provinsi, perubahan terbesar terlihat di Sumatera Utara yang ketika evaluasi *baseline* mengatakan lebih banyak menggunakan sistem *pull* daripada *push*. (Gambar 16).

Gambar 16: Persentase fasyankes yang mengatakan tingkat yang lebih tinggi menetapkan jumlah pasokan alokon dibagi berdasarkan provinsi



Temuan

CARA FASYANKES MENENTUKAN JUMLAH PASOKAN ULANG KE TINGKAT DI BAWAHNYA

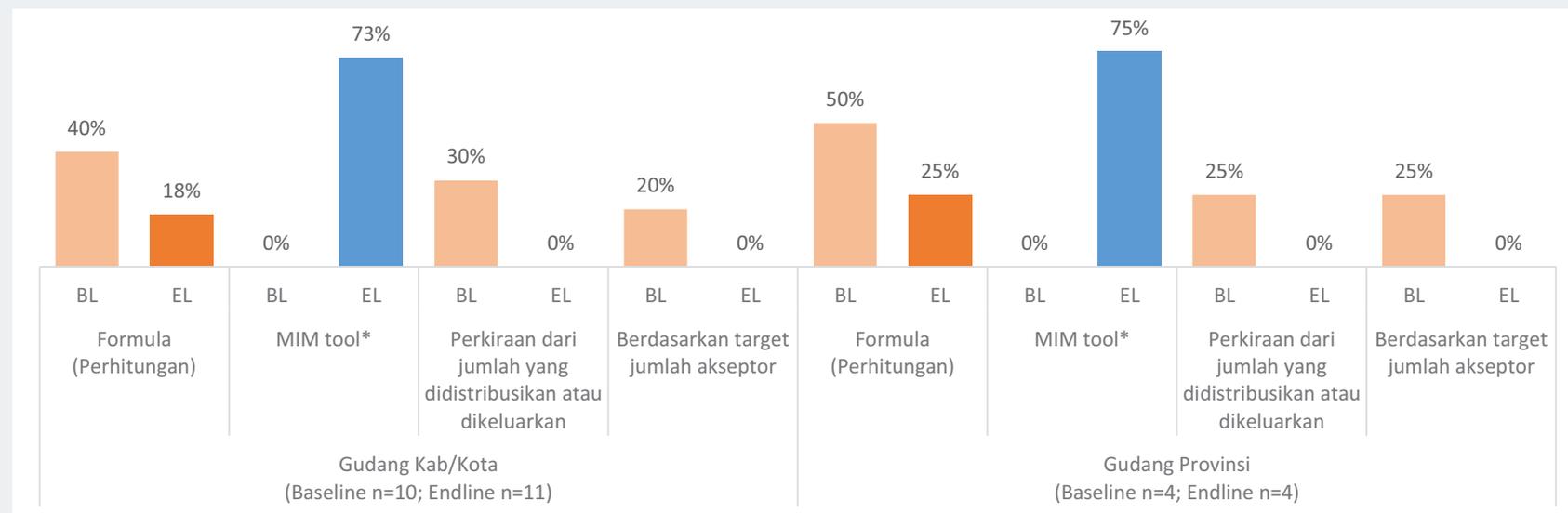
MIM tool diperkenalkan untuk digunakan pengelola di Provinsi dan Kab/Kota untuk menghitung jumlah alokon yang perlu dipasok ulang ke fasilitas di bawahnya. Ketika evaluasi *baseline*, provinsi dan kab/kota menghitung jumlah pasokan ulang dengan rumus, perkiraan jumlah alokon yang dikeluarkan, atau berdasarkan target klien yang harus dijangkau untuk ber-KB. Sebagaimana terlihat di Gambar 17, mayoritas provinsi dan kab/kota kini memanfaatkan MIM tool untuk menentukan jumlah pasokan ulang.

Di lokakarya kualitatif, peserta mengatakan bahwa dengan menggunakan MIM tool mereka kini lebih mampu memasok ulang alokon dalam jumlah yang tepat. Pengelola di Kab. Brebes, Jawa Tengah mengatakan bahwa satu penyebab utama kinerja rantai pasok telah jauh membaik adalah penggunaan MIM tool dan kepatuhan terhadap SOP. Akan tetapi peserta lokakarya kualitatif di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara mengakui bahwa mereka tidak selalu menggunakan jumlah alokon hasil perhitungan MIM tool. Alasannya adalah mereka takut memberi faskes terlalu banyak stok, walaupun sebagai akibatnya faskes kadang mengalami *stockout*.

“Kita sekarang dapat melihat data secara keseluruhan! Terutama data konsumsi yang menunjukkan kebutuhan yang sesungguhnya. Perangkat Manajemen Inventaris & Monitoring (MIM Tool) sungguh membantu kami membuat analisis secara mudah dan cepat dan menghitung jumlah pasokan ulang dengan benar.”

SUBBAG KEUANGAN DAN BMN,
KANTOR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH

Gambar 17: Bagaimana jumlah pasokan ulang ditetapkan untuk fasyankes di tingkat lebih bawah

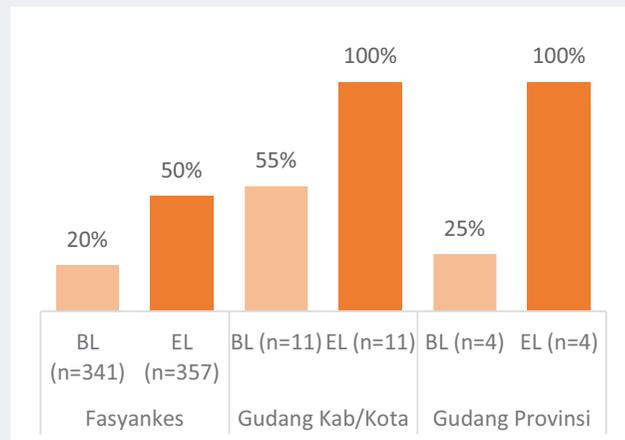


Temuan

TANTANGAN DALAM MEMPEROLEH ALOKON

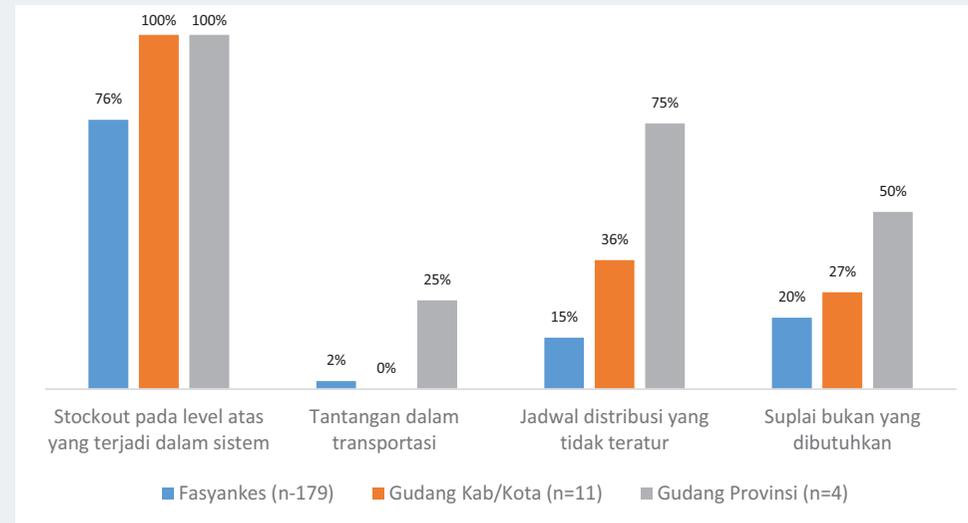
Saat evaluasi *endline*, 52% dari fasilitas di semua tingkatan mengatakan mengalami kesulitan untuk memperoleh alokon dibandingkan dengan 21% faskes saat *baseline*. Dari mereka yang mengalami kesulitan ini, persentase fasilitas yang mengalami kesulitan memang meningkat untuk semua jenis fasyankes dan gudang. (Gambar 18). Di Jawa Tengah, persentase faskes yang mengalami kesulitan sedikit menurun, tapi di ketiga provinsi lainnya, persentasenya meningkat antara *baseline* dan *endline*.

Gambar 18: Persentase fasilitas yang mengalami kesulitan memperoleh alokon dibagi berdasarkan jenis fasilitas



Tantangan yang paling umum dikemukakan oleh responden di semua jenis fasilitas, baik pada *baseline* maupun *endline*, adalah *stockout* di tingkat yang lebih tinggi (Gambar 19). Pada evaluasi *endline*, 3 dari 4 gudang provinsi juga melaporkan jadwal distribusi yang tidak tetap, sementara 2 provinsi mengatakan tidak menerima pasokan yang dibutuhkan sebagai tantangan dalam penerimaan alokon. Di tingkat kab/kota dan fasyankes, sangat sedikit yang melaporkan mengalami kesulitan di bidang ini. Distribusi ke provinsi dilakukan berdasarkan pengaturan pengadaan oleh BKKBN Pusat dengan pemasok, yang saat itu belum mengikuti proses perencanaan pasokan ataupun manajemen inventaris yang spesifik.

Gambar 19: Alasan yang disampaikan pada evaluasi *endline* terkait dengan kesulitan memperoleh alokon



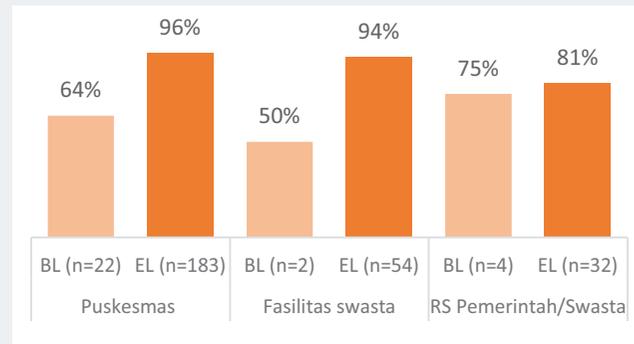
Di lokakarya kualitatif, terutama di Jawa Tengah, provinsi menjelaskan bahwa sulit menjamin pasokan yang memadai ke tiga kabupaten PilihanKu sementara ada 32 kab/kota lainnya yang meminta pasokan tanpa didasarkan pada data konsumsi. Responden yakin bahwa ketika semua kab/kota sudah menerapkan sistem baru ini, masalah akan dapat diatasi dan situasi lebih mudah dikelola. Responden dari kab/kota di Jawa Tengah juga mengatakan salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM untuk memproses permintaan dari begitu banyak fasyankes – yang dampaknya mungkin terlihat di hasil analisis kuantitatif.

Temuan

PERMINTAAN DARURAT

Di evaluasi *baseline* hanya 11% dari fasilitas mengatakan memiliki cara untuk mengajukan permintaan darurat. Pada evaluasi *endline* jumlahnya telah naik hingga 75%. Prosedur permintaan darurat adalah komponen utama dalam paket intervensi yang diterapkan oleh proyek PilihanKu. Sebagaimana terlihat di Gambar 20, peningkatan jumlah fasilitas yang memiliki prosedur itu meningkat tajam untuk semua jenis fasilitas.

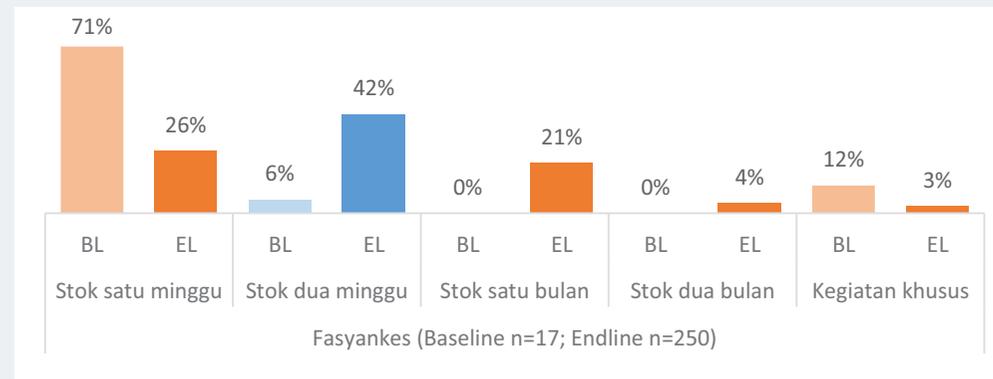
Gambar 20: Persen fasilitas yang memiliki cara mengajukan permintaan darurat dan memiliki prosedurnya



Prosedur permintaan darurat merinci kapan permintaan darurat perlu diajukan agar pasokan ulang dapat diberikan sebelum fasilitas kehabisan stok. Di evaluasi *endline* 93% fasilitas mengatakan memiliki tingkat stok untuk memicu permintaan darurat dibandingkan dengan 61% di *baseline*.

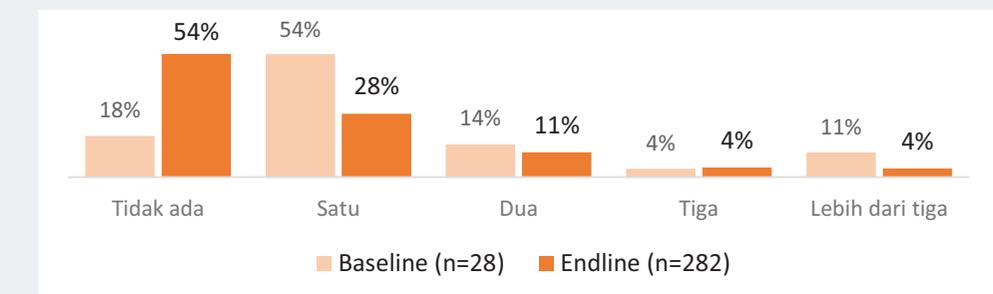
Tingkat permintaan darurat untuk fasyankes yang diterapkan proyek ditetapkan ketika tingkat ketersediaan berada pada 2 minggu. Saat evaluasi *baseline*, mayoritas fasyankes (71%) mengatakan mengajukan permintaan darurat bila stok mereka hanya tinggal untuk satu minggu. Sedangkan di *endline*, persentasi ini telah turun hingga 26%, dan 42% fasyankes mengatakan mengajukan permintaan darurat di tingkat ketersediaan dua minggu, sesuai dengan prosedur baru. (lihat Gambar 21).

Gambar 21: Tingkat ketersediaan di mana fasyankes yang memiliki prosedur permintaan darurat mengajukan permintaan darurat



Antara *baseline* dan *endline*, jumlah permintaan darurat yang diajukan faskes yang memiliki prosedur untuk itu menunjukkan penurunan secara keseluruhan dalam 6 bulan terakhir, seperti terlihat di Gambar 22.

Gambar 22: Jumlah permintaan darurat yang diajukan dalam 6 bulan terakhir

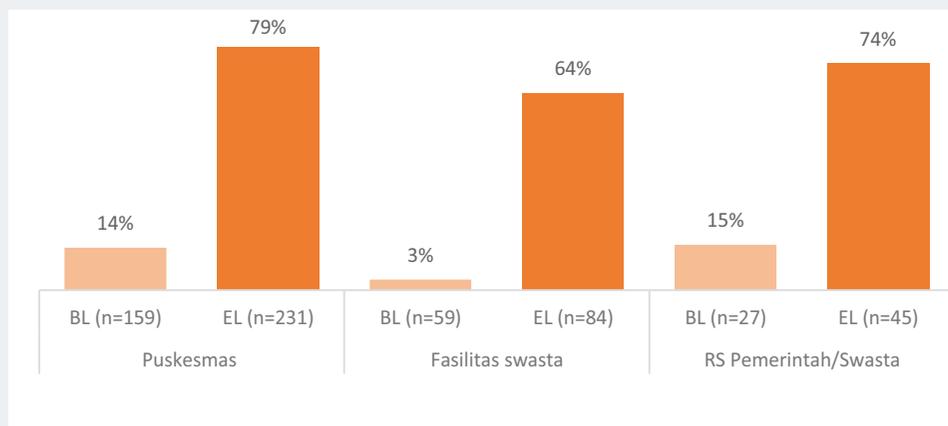


Temuan

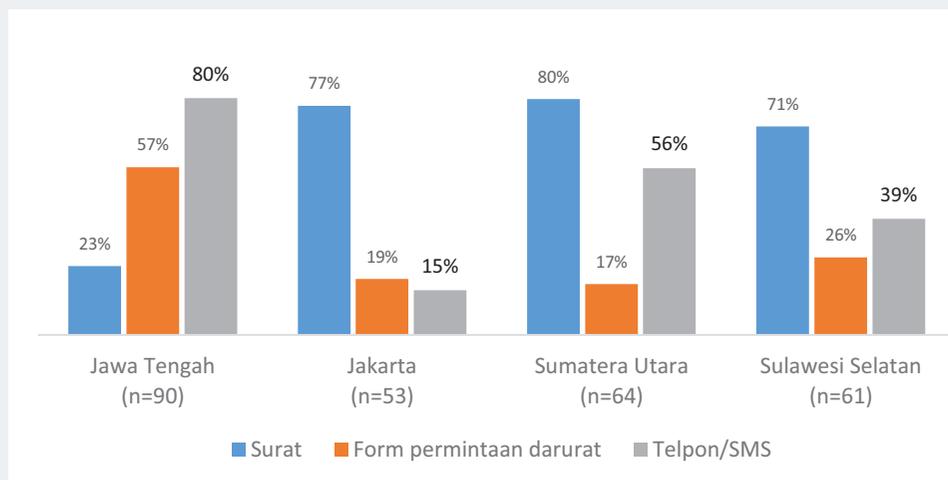
Di evaluasi *baseline* hanya 11% fasilitas memiliki cara untuk mengajukan permintaan darurat; Pada evaluasi *endline* terlihat peningkatan yang signifikan untuk semua kategori fasilitas menjadi 75% secara keseluruhan ($p < 0.001$). (Gambar 23) Semua provinsi mengalami peningkatan signifikan dalam persentase fasilitas yang memiliki cara untuk mengajukan permintaan darurat; 95% fasilitas di Jawa Tengah, 84% fasilitas di Sulawesi Selatan dan 72% fasilitas di Sumatera Utara. Di Jakarta 53% fasilitas mengatakan memiliki cara untuk mengajukan permintaan darurat; Ini mungkin disebabkan karena Jakarta adalah provinsi terakhir yang mulai menerapkan intervensi, dan kemungkinan persentase ini akan meningkat seiring dengan berlalunya waktu.

Seperti terlihat di Gambar 24, sebagian besar fasilitas mengajukan permintaan darurat melalui surat atau telepon/pesan dan tidak menggunakan formulir permintaan darurat. Fasilitas di Jawa Tengah terutama melakukan itu, sedangkan mereka di ketiga provinsi lainnya cenderung menggunakan surat. Dalam wawancara kualitatif, beberapa kab/kota mengatakan menggunakan aplikasi *WhatsApp* untuk mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi pasokan.

Gambar 23: Persentase fasyankes yang memiliki cara untuk mengajukan permintaan darurat dibagi berdasarkan jenis fasyankes



Gambar 24: Cara mengajukan permintaan darurat ke tingkat yang lebih tinggi dibagi berdasarkan provinsi



Rekomendasi

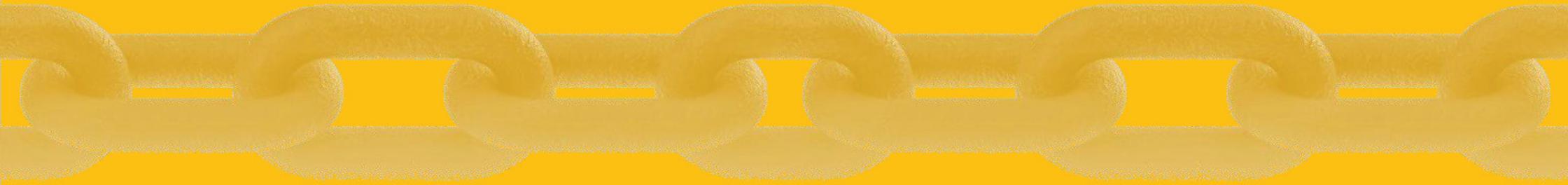
PilihanKu menyarankan agar prosedur manajemen inventaris yang telah diterapkan diperkuat kembali melalui pelatihan dan supervisi pendukung (bimtek) di provinsi yang telah menerapkannya sekarang dan di provinsi replikasi dan perluasan. Supervisor perlu memastikan bahwa semua petugas pengelola alokon memiliki pedoman dan instruksi kerja yang tepat sebagai rujukan dalam pelaksanaan tugas manajemen inventaris mereka. Peserta lokakarya kualitatif mengatakan bahwa kepatuhan kepada SOP, penggunaan jumlah hasil perhitungan pasokan dari MIM tool, dan perbaikan dalam kualitas data akan membuat manajemen inventaris menjadi lebih efektif. Selain itu, juga dianjurkan untuk mengimplementasikan MIM Tool berbasis web di tingkat provinsi dan kab/kota agar sistem kontrol inventaris min-maks standar dapat diterapkan yang akan mengurangi ketidakseimbangan stok di gudang kab/kota dan di fasyankes.

Kab/kota yang belum menggunakan prosedur manajemen inventaris ini menyulitkan ketersediaan pasokan di provinsi. Ketidakteraturan prosedur yang digunakan untuk memperoleh alokon menambah beban kerja di provinsi. Semakin cepat sistem manajemen inventaris ini dapat diperluas ke semua kab/kota dalam satu provinsi, semakin efisien sistem akan berjalan. Di beberapa kab/kota, keterbatasan SDM terus menjadi kendala dalam memproses permintaan pasokan dari fasyankes, untuk itu dianjurkan agar kab/kota ini mencari cara untuk merekrut tambahan SDM bagi manajemen inventaris.

Pasokan ulang di tiap tingkat dianjurkan agar didasarkan pada konsumsi dan bukan target layanan. Sistem kontrol inventaris yang dilaksanakan dengan baik dapat memprediksi peningkatan atau penurunan permintaan sehingga menjamin bahwa tingkat stok memadai.

Ketersediaan produk di gudang banyak terhambat oleh mekanisme kontrol inventaris yang tidak memadai di tingkat pusat. Dianjurkan tingkat pusat mengembangkan sebuah sistem untuk memantau tingkat ketersediaan dan mengelola proses pengadaan serta perencanaan pasokan mereka berdasarkan kebutuhan di tingkat yang lebih bawah.

Di tingkat pusat, sistem redistribusi atau realokasi yang tepat sangat dibutuhkan agar provinsi yang memerlukan tambahan alokon dipastikan dapat menerimanya sementara stok berlebih yang ada di provinsi lain tidak berisiko kedaluwarsa sebelum dipakai.



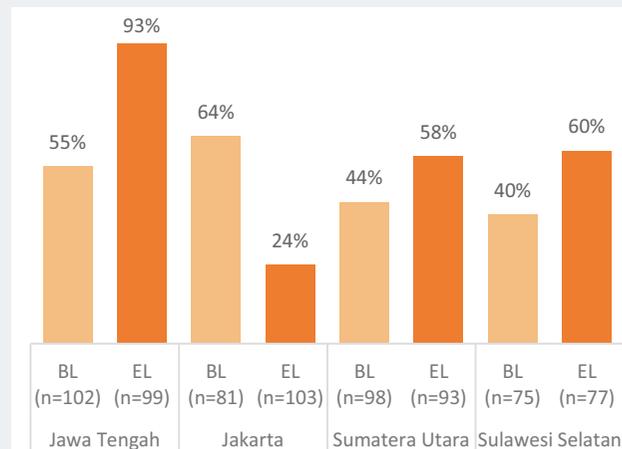
IV. Distribusi

Temuan

PROSEDUR DISTRIBUSI

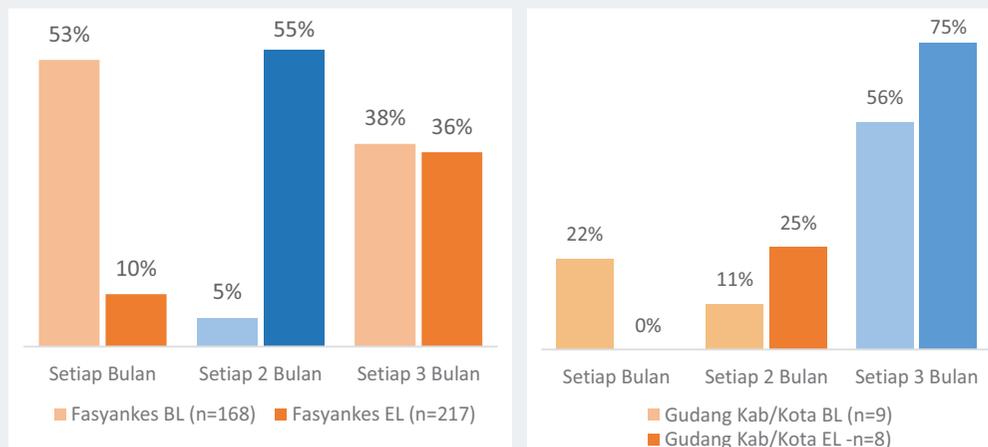
Untuk memastikan pasokan alokon yang kontinu dan berkualitas, pengelola alokon tidak hanya perlu menerapkan sistem kontrol inventaris yang efektif, tapi juga menjalankan sistem distribusi yang efisien dan konsisten, terdokumentasi dengan baik dan dipahami oleh penerima, misalnya fasyankes. Berkat intervensi PilihanKu, secara keseluruhan, antara *baseline* dan *endline*, jumlah fasilitas yang mengatakan memiliki jadwal distribusi meningkat dari 51% menjadi 58% ($p = 0.042$). Akan tetapi hasil di tingkat provinsi bervariasi; Perbaikan signifikan terjadi di Jawa Tengah sementara Jakarta justru mengalami penurunan dalam persentase fasilitas yang memiliki jadwal distribusi. (Gambar 25)

Gambar 25: Fasilitas yang memiliki jadwal distribusi dibagi berdasarkan provinsi



Dalam proyek PilihanKu, sistem distribusi yang dibentuk sejalan dengan sistem manajemen inventaris memberi instruksi kapan distribusi perlu dilakukan dari tingkat yang lebih tinggi sebagai pemberi ke tingkat yang lebih rendah sebagai penerima. Fasyankes menerima pasokan alokon tiap bulan kedua, jadi separuh dari fasyankes menerima pasokannya di satu bulan, dan separuh dari fasyankes lainnya menerima pasokan mereka di bulan berikutnya. Kab/kota dirancang untuk menerima pasokan alokon tiap triwulan. Distribusi dilaksanakan di minggu terakhir dari bulan. Provinsi menerima alokon langsung dari pemasok tanpa ada jadwal khusus, walaupun umumnya pengiriman ke provinsi dilaksanakan setahun sekali.

Gambar 26: Seberapa sering fasyankes dan gudang kab/kota harus menerima alokon



Gambar 26 menunjukkan bahwa mayoritas fasyankes mengerti bahwa ada perubahan prosedur dari tiap bulan menjadi tiap dua bulan (diagram batang berwarna biru), akan tetapi hampir sepertiga fasyankes tetap mengharapkan pasokan tiap triwulan. Untuk gudang kab/kota juga ada peningkatan dalam jumlah responden yang memahami prosedur yang benar dan mengharapkan pasokan tiap triwulan (diagram batang berwarna biru).

Temuan

JADWAL DISTRIBUSI

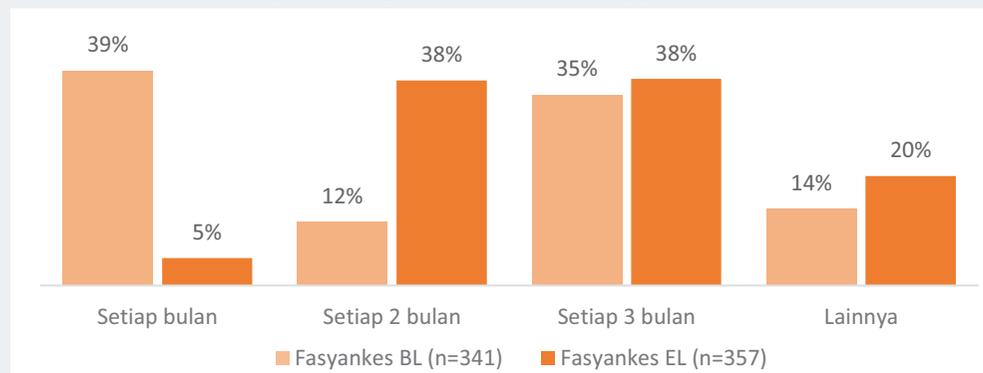
Sejalan dengan temuan mengenai pemahaman akan prosedur distribusi, juga terlihat ada pergeseran antara *baseline* dan *endline* terkait dengan kapan sebagian besar fasyankes menerima pasokan mereka sesuai dengan perubahan prosedur. Peserta lokakarya kualitatif yang berasal dari kab/kota mengatakan satu pembelajaran penting yang mereka peroleh adalah bahwa jadwal distribusi bergilir ke fasyankes terbukti mengurangi beban kerja rutin mereka, dan secara umum jadwal distribusi mereka telah membaik.



Kendaraan untuk distribusi di Kab. Cilacap, Jawa Tengah

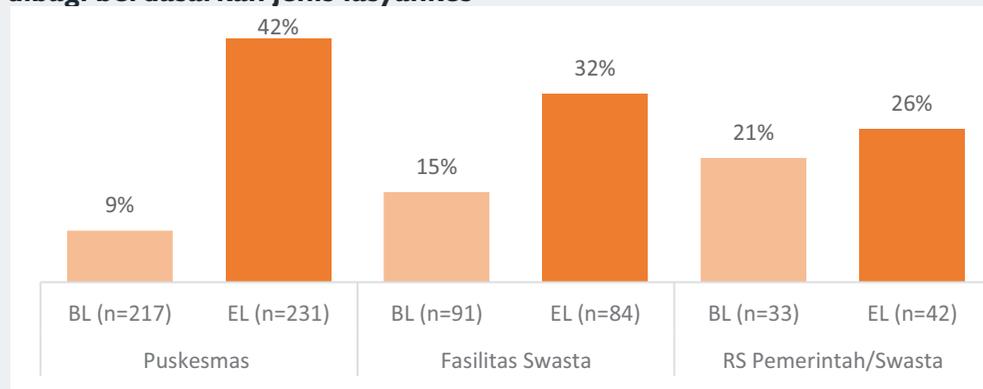
Saat evaluasi *baseline* mayoritas fasyankes mengaku menerima pasokan tiap bulan (39%) atau tiap tiga bulan (35%). Di evaluasi *endline* fasyankes mengatakan menerima pasokan tiap dua bulan (38%) atau tiap tiga bulan (38%). Ini menunjukkan ada pergeseran ke prosedur baru, tapi juga bahwa masih perlu dilakukan upaya lebih banyak untuk membentuk sistem distribusi rutin yang konsisten. (Gambar 27).

Gambar 27: Seberapa sering fasyankes sesungguhnya menerima alokon



Peningkatan terbesar dalam jumlah fasyankes yang menerima pasokan tiap dua bulan sesuai jadwal distribusi terlihat di puskesmas, yaitu dari 9% menjadi 42% (Gambar 28).

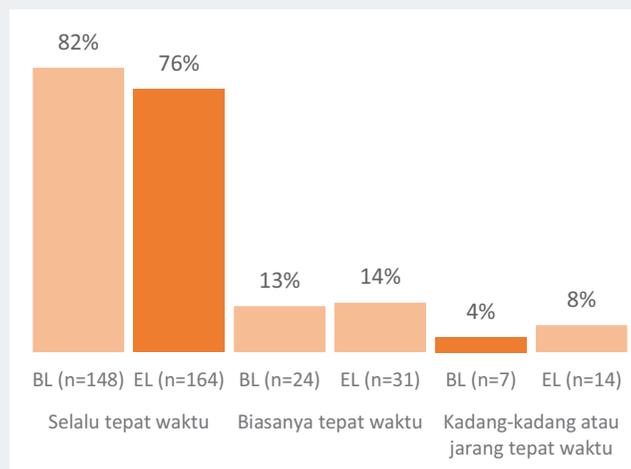
Gambar 28: Fasyankes yang mengatakan menerima alokon tiap dua bulan dibagi berdasarkan jenis fasyankes



Temuan

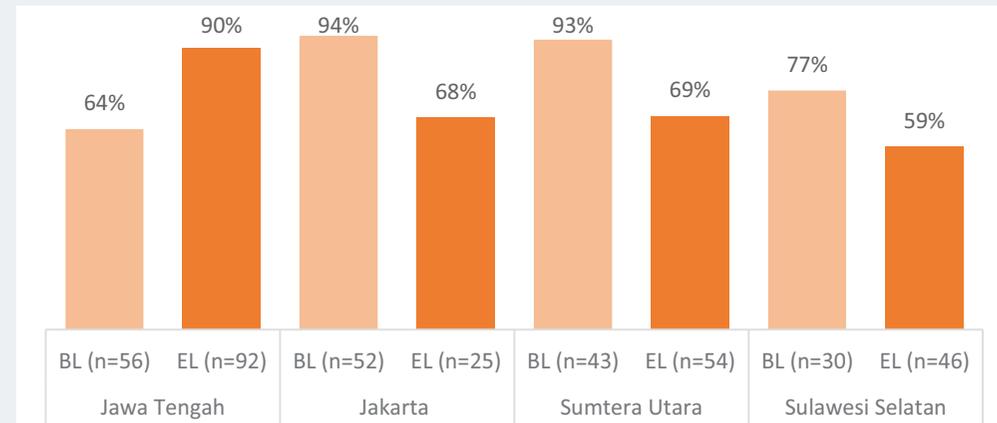
Di antara fasilitas yang mengatakan memiliki jadwal distribusi alokon, (58%), mayoritas (fasyankes dan gudang kab/kota) mengatakan secara umum menerima alokon tepat waktu baik pada *baseline* maupun pada *endline* (Gambar 29).

Gambar 29: Fasilitas yang mengatakan pasokan tiba tepat waktu



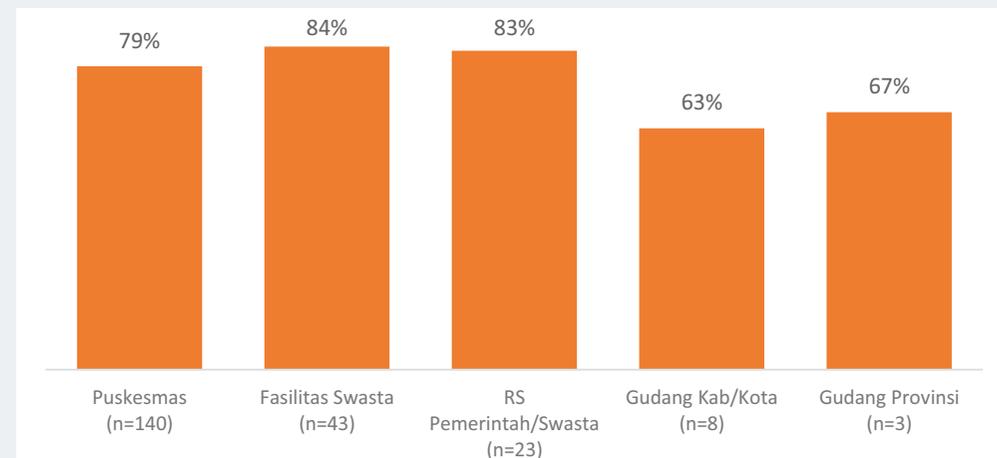
Akan tetapi, di Jawa Tengah terlihat ada peningkatan drastis dalam persentase fasilitas yang selalu menerima alokon tepat waktu antara *baseline* dan *endline*, sedangkan di ketiga provinsi lainnya, persen faskes yang menerima alokon tepat waktu justru menurun, seperti terlihat di Gambar 30.

Gambar 30: Fasilitas yang mengatakan selalu menerima pasokan tepat waktu dibagi berdasarkan provinsi



Fasilitas yang menyatakan diberitahu bahwa mereka akan menerima alokon sebelum pengiriman tiba terbanyak ditemui di Jawa Tengah (90% fasilitas). Fasyankes lebih mungkin menerima pemberitahuan tersebut dibandingkan dengan gudang. (Gambar 31)

Gambar 31: Fasilitas di *endline* yang diberitahu oleh tingkat lebih tinggi bahwa mereka akan menerima alokon dibagi berdasarkan jenis fasilitas



Temuan

Di lokakarya kualitatif di Sulawesi Selatan, peserta mengemukakan bahwa sistem manajemen inventaris akan bekerja baik bila jadwal distribusi ditepati sesuai SOP; mereka mengatakan bahwa mereka sering menunda distribusi hingga melampaui jadwal. Sumatera Utara baru-baru ini berhasil mengatasi kendala transportasi mereka yang akan membuat distribusi mereka semakin tepat waktu. Kendala transportasi dan keterbatasan SDM juga dikemukakan sebagai penghalang di dua kabupaten di Jawa Tengah, dan di Jakarta Timur.

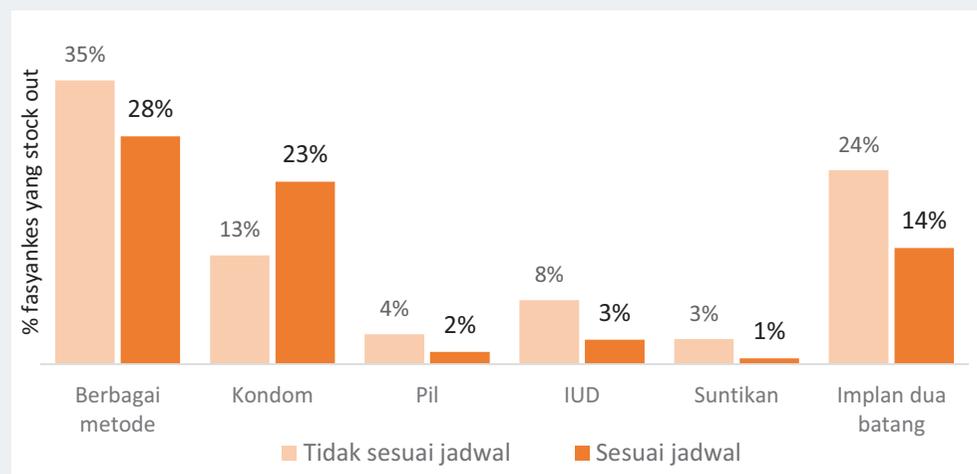
Rekomendasi

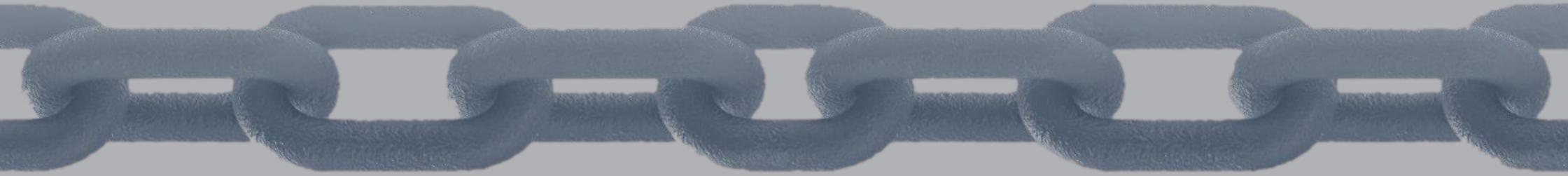
Sistem manajemen inventaris yang dilaksanakan dengan baik perlu mengikuti jadwal distribusi yang tetap. Tanpa itu, sistem tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Evaluasi *endline* mengindikasikan bahwa ketika jadwal distribusi sekali tiap dua bulan diikuti, tingkat *stockout* di fasyankes menurun. Sebagaimana disampaikan peserta lokakarya kualitatif, distribusi perlu dilaksanakan di waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Sejalan dengan rekomendasi untuk manajemen inventaris, kepatuhan terhadap prosedur distribusi yang dirancang di didokumentasikan dalam SOP perlu ditekankan saat pelatihan dan supervisi pendukung (*bimtek*) agar sistem dapat beroperasi efisien secara optimal. Kendala transportasi dan SDM perlu diatasi di tahap awal dalam perluasan sistem sehingga sistem dapat segera membuahkan hasil di awal implementasi.

Semua titik pasokan ulang disarankan untuk mematuhi jadwal distribusi rutin agar pasokan ulang dapat dijamin tepat waktu. Jadwal distribusi bergilir disarankan untuk dirancang dengan mengoptimalkan rute perjalanan untuk mengurangi beban kerja petugas dan mengoptimalkan biaya distribusi. Pada akhirnya, BKKBN juga disarankan untuk mensosialisasikan panduan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang ada di kab/kota untuk kebutuhan transport dan distribusi alokon sekaligus memastikan bahwa dana dapat diakses dan dipakai untuk tujuannya.

Analisis kejadian *stockout* dibandingkan dengan frekuensi distribusi ada di gambar di bawah ini. Dapat dilihat bahwa tingkat kejadian *stockout* secara umum menurun bila alokon disalurkan sesuai jadwal, walaupun perbedaan yang signifikan baru terlihat di tingkat *stockout* untuk implan dua batang.

Gambar 32: % fasyankes yang mengalami *stockout* dibandingkan bila distribusi dilaksanakan sesuai jadwal (tiap dua bulan)





V. Sistem
Informasi
Manajemen
Logistik (*LMIS*)

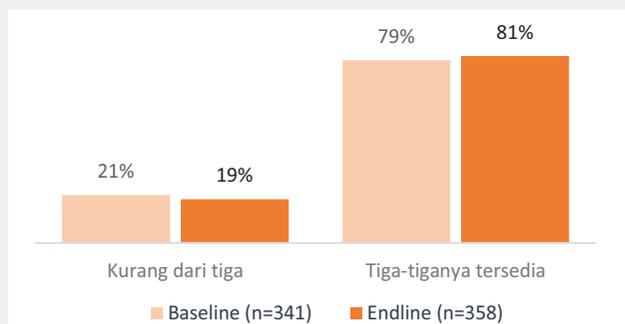
Temuan

LAPORAN DAN CATATAN SIM-LOG (LMIS)

Rantai pasok yang kuat harus memiliki visibilitas data yang baik, berdasarkan catatan rutin yang diperbaharui secara akurat, dan pelaporan tepat waktu. Dengan demikian pengelola dan supervisor dalam sistem dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Meningkatkan kualitas data dan penggunaan data secara rutin untuk pengambilan keputusan adalah komponen kunci dalam intervensi proyek PilihanKu.

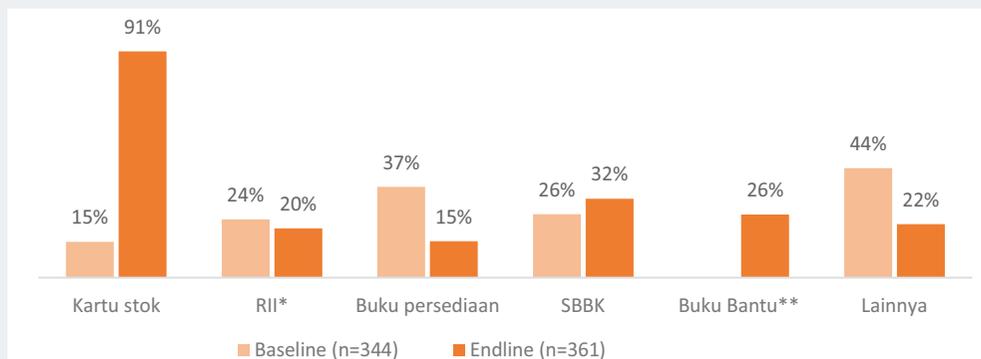
Laporan logistik sudah sangat baik di semua provinsi dan kab/kota sejak *baseline*; semua gudang 100% melaporkan data untuk tiga bulan terakhir dan ini terus berlanjut hingga *endline*. Di tahap *baseline* 79% fasyankes memiliki arsip laporan tiga bulan terakhir, dan meningkat sedikit di *endline* menjadi 81%. Sehingga fasyankes yang tidak memiliki laporan 3 bulan terakhir sedikit berkurang dari 21% di *baseline* menjadi 19% di *endline*.

Gambar 33: Jumlah laporan dari 3 bulan terakhir yang ada di fasyankes



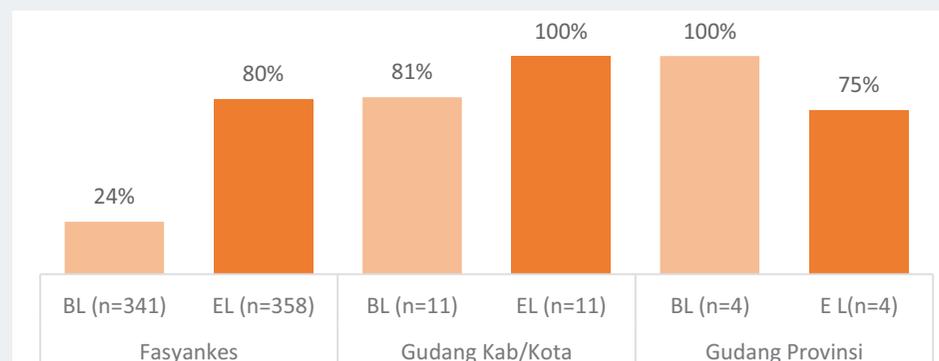
Langkah pertama untuk membuat laporan yang akurat adalah penggunaan catatan stok. Saat evaluasi *baseline* sebagian besar gudang mengatakan menggunakan kartu stok atau buku bantu untuk membuat laporan. Akan tetapi di tingkat fasyankes, saat *baseline* hanya 15% fasyankes menggunakan kartu stok untuk pelaporan mereka; sedangkan di *endline* lebih dari 90% fasyankes telah menggunakan kartu stok.

Gambar 34: Form yang menjadi rujukan fasyankes saat mengisi laporan ke BKKBN



Jumlah fasyankes dengan kartu stok yang jumlah stoknya diperbaharui meningkat signifikan antara *baseline* dan *endline*, dari 24% menjadi 80%. Penggunaan kartu stok di gudang kab/kota dan provinsi saat *baseline* sudah tinggi dan perubahan yang dicapai di saat *endline* tidak terlalu signifikan.

Gambar 35: Persentase fasyankes dengan kartu stok yang informasi jumlah stoknya lengkap untuk semua layanan alokon BKKBN yang mereka berikan

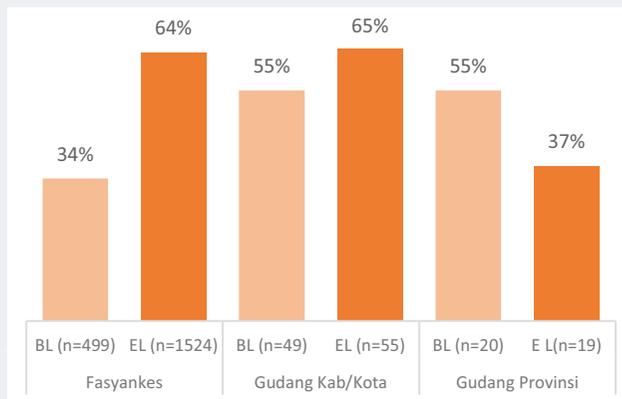


Temuan

CATATAN STOK

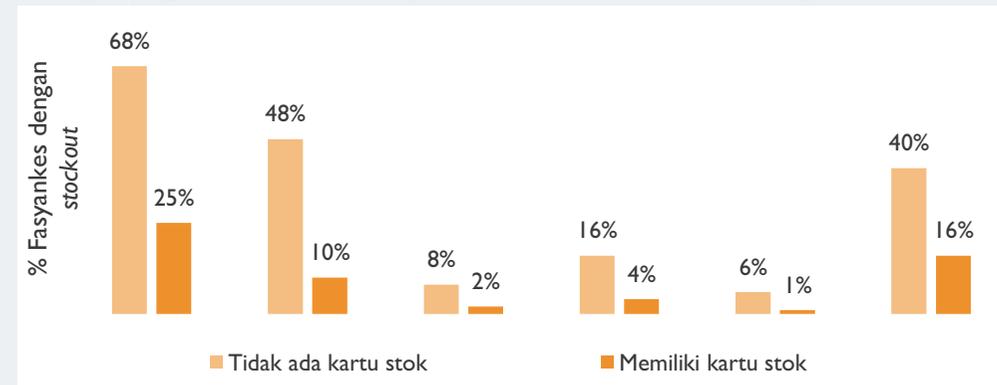
Catatan stok yang akurat menghasilkan laporan yang akurat. Untuk menilai akurasi catatan stok di fasyankes yang menggunakan kartu stok, pengumpul data membandingkan informasi stok yang tercatat dengan hasil hitung fisik alokon sebagai ukuran akurat kartu stok. Di tahap *baseline* akurasi kartu stok rendah, hanya 34% dari kartu stok yang dikaji di fasyankes memiliki jumlah stok yang cocok dengan hasil hitung fisik. Di gudang kab/kota dan provinsi akurasi kartu stok saat *baseline* 55%. Di evaluasi *endline* akurasi naik hampir dua kali lipat, 61% fasyankes memiliki catatan jumlah stok yang cocok dengan hasil hitung fisik. Di tingkat yang lebih atas akurasi justru sedikit menurun saat *endline*, untuk gudang provinsi menjadi 32% dan untuk gudang kab/kota menjadi 49%.

Gambar 36: Persentase kartu stok yang jumlah di catatan cocok dgn hasil hitung fisik



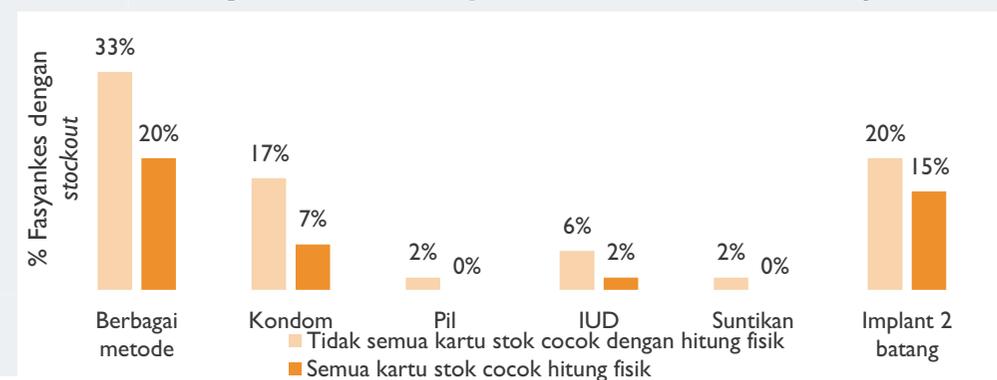
Untuk memahami dampak kartu stok pada rantai pasok, dilakukan perbandingan tingkat *stockout* di fasyankes yang memiliki kartu stok untuk semua metode dan fasyankes yang tidak menggunakan kartu stok secara konsisten untuk kesemua alokon. Hasilnya konsisten menunjukkan bahwa fasyankes yang menggunakan kartu stok memiliki tingkat *stockout* yang jauh lebih rendah dari fasyankes yang tidak menggunakan kartu stok.

Gambar 37: Persentase *stockout* dan penggunaan kartu stok (ya atau tidak) dibagi berdasarkan fasyankes dan metode kontrasepsi



Trend yang sama terlihat saat tingkat *stockout* dibandingkan dengan akurasi pada kartu stok, yaitu jumlah stok akhir di kartu stok cocok dengan hasil hitung fisik.

Gambar 38: Persentase *stockout* dan akurasi (akurat atau tidak akurat) kartu stok dibagi berdasarkan fasyankes dan metode kontrasepsi

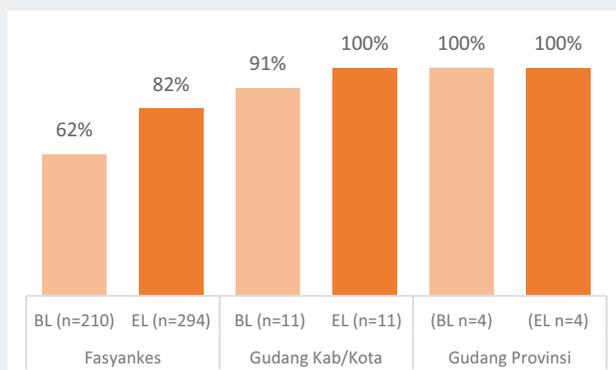


Temuan

PENGGUNAAN DATA

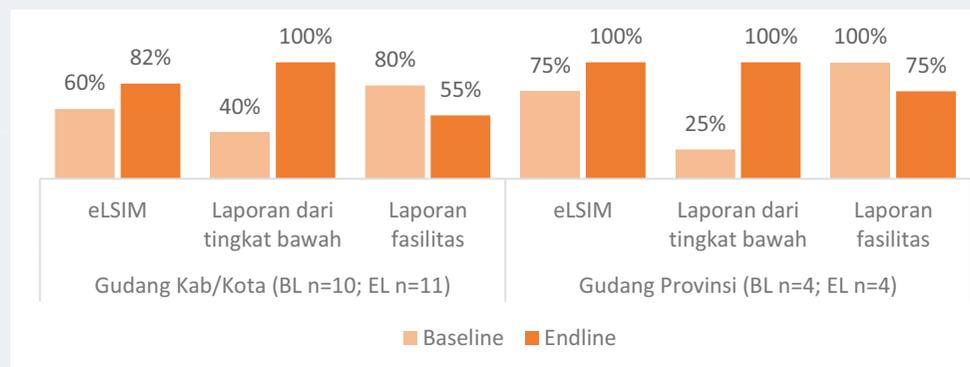
Tema utama dari intervensi PilihanKu adalah peningkatan penggunaan data rantai pasok. Dari *baseline* ke *endline*, persentase fasyankes yang menggunakan data logistik bertambah signifikan dari 63% menjadi 83% ($p < 0.001$). Peningkatan tertinggi dalam penggunaan data terlihat di semua jenis fasyankes seperti diilustrasikan di Gambar 39.

Gambar 39: Persentase fasilitas yang menggunakan data logistik



Pengumpul data menanyakan bagaimana responden di fasyankes dan gudang mengakses data logistik yang mereka gunakan. Saat *baseline* 60% gudang kab/kota dan 75% gudang provinsi mengatakan mereka menggunakan eLMIS. Di *endline*, persentasenya naik ke 82% utk kab/kota dan 100% untuk provinsi. Di *baseline* hanya 40% gudang kab/kota dan 25% gudang provinsi mengatakan mengakses data laporan bentuk kertas dari tingkat yang lebih bawah. Tapi di *endline* persentasenya meningkat menjadi 100% untuk provinsi dan kab/kota. Lihat Gambar 40.

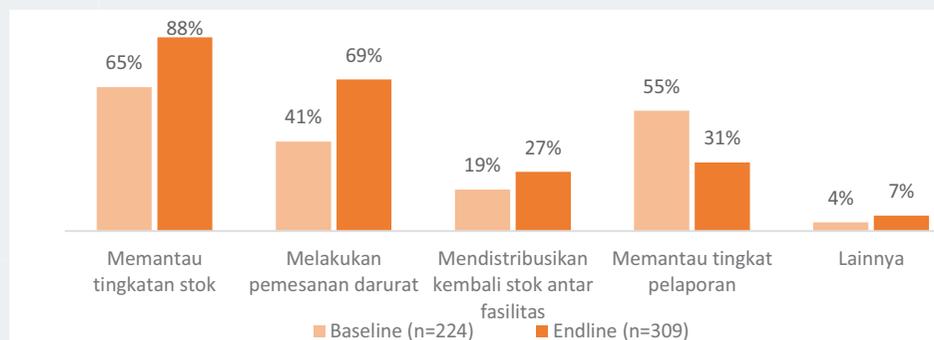
Gambar 40: Bagaimana petugas gudang mengakses data logistik



Di fasyankes cara petugas mengakses data tidak berubah antara *baseline* dan *endline*. Mayoritas responden mengatakan menggunakan catatan fasyankes (80% saat *baseline* dan 87% saat *endline*). Lainnya mengatakan menggunakan laporan bentuk kertas dari tingkat yang lebih bawah (45% di *baseline* dan 46% di *endline*). Sangat sedikit fasyankes yang menggunakan eLMIS sebagai sumber data (2% di *baseline* dan 3% di *endline*).

PilihanKu menekankan agar data dipakai dalam pekerjaan sehari-hari terkait dengan pengambilan keputusan mengenai pasokan ulang dan distribusi alokon, juga untuk pemantauan kinerja jangka panjang. Hasilnya menunjukkan peningkatan dalam pemantauan indikator utama rantai pasok terutama mengenai pencegahan *stockout* melalui permintaan darurat.

Gambar 41: Bagaimana fasyankes memakai data logistik untuk pengambilan keputusan



Temuan

PELATIHAN PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pelatihan berfungsi melengkapi petugas dengan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugasnya. Temuan di *baseline* mengindikasikan bahwa di semua tingkat terjadi kesenjangan pelatihan untuk semua formulir utama logistik. Kesenjangan terbesar ada pada pelatihan pengisian formulir pencatatan logistik.

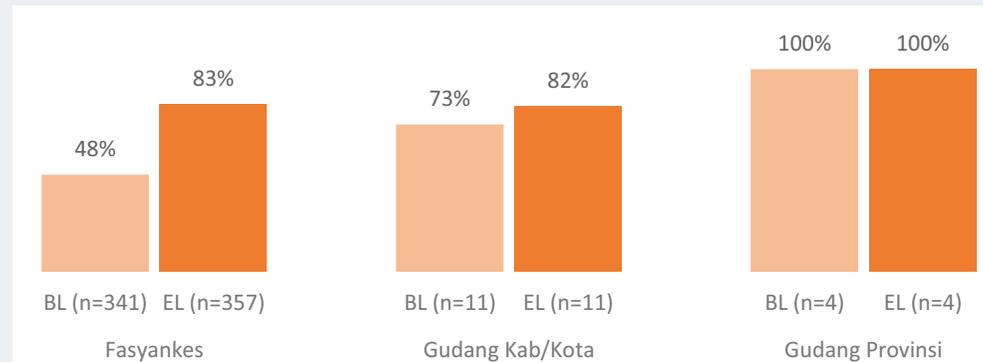
Di *baseline* 30% responden mengatakan sudah dilatih dalam pencatatan dan pelaporan logistik; di *endline* angka ini tetap sama untuk pelatihan yang tidak diselenggarakan PilihanKu. Akan tetapi, melalui kegiatan proyek, saat *endline* lebih dari 90% responden mengatakan telah dilatih mengenai pencatatan dan pelaporan logistik.

“Fasyankes dulunya tidak terlalu peduli mengenai catatan yang akurat. Program pendampingan dan pelatihan OJT ini memberi kami mekanisme untuk memberi tahu fasyankes pentingnya memiliki catatan yang akurat. Sekarang fasyankes konsisten melakukan hitung fisik tiap akhir bulan.”

KEPALA BIDANG KB, KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH

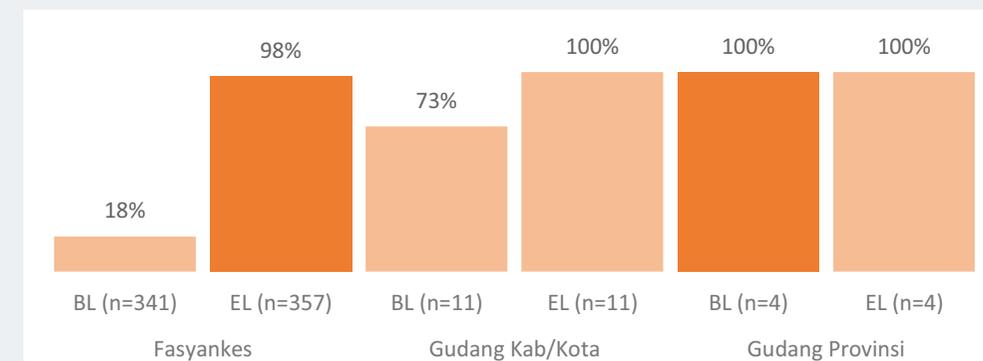
Di *baseline* kurang dari 75% fasilitas di semua tingkat mengatakan memiliki minimal satu orang petugas yang dilatih mengisi formulir F/II/KB (laporan bulanan fasyankes) dan formulir F/V5/KB (laporan bulanan gudang); saat *endline* persentasenya sudah naik di atas 90% di semua tingkat. Peningkatan pelatihan terutama signifikan di tingkat fasyankes yang saat *baseline* hanya 48% dan di *endline* mencapai 83%.

Gambar 42: Persentase fasilitas dengan minimal satu petugas dilatih tentang formulir F/II/KB ataupun F/V/KB



Di *baseline* hanya 18% fasyankes memiliki minimal satu petugas yang dilatih mengisi kartu stok. Saat *endline* persentasenya telah naik menjadi 98%. Sebanyak 68% responden dari berbagai fasilitas di semua tingkatan telah menonton video tutorial instruksi kerja manajemen stok.

Gambar 43: Persentase fasilitas dengan minimal satu petugas dilatih mengisi kartu stok



Temuan

Melalui diskusi kualitatif diperoleh informasi bahwa perbaikan pencatatan dan pelaporan dapat tercapai berkat penguatan supervisi pendukung (bimtek) yang mencakup pelatihan *on-the-job* (OJT) di fasyankes. Juga disampaikan bahwa pelatihan manajemen inventaris bagi petugas fasyankes menekankan pentingnya kartu stok sehingga penggunaan kartu stok untuk mencatat transaksi logistik juga meningkat.

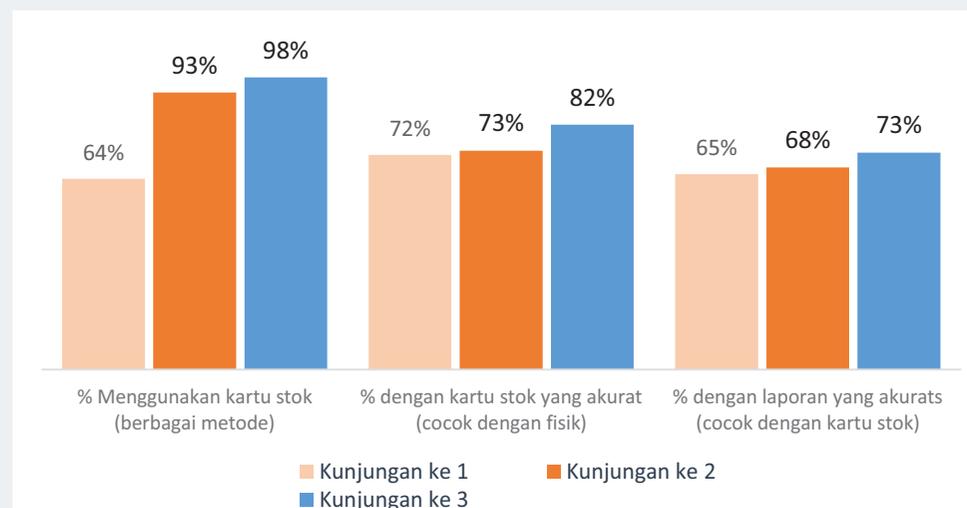
Rekomendasi

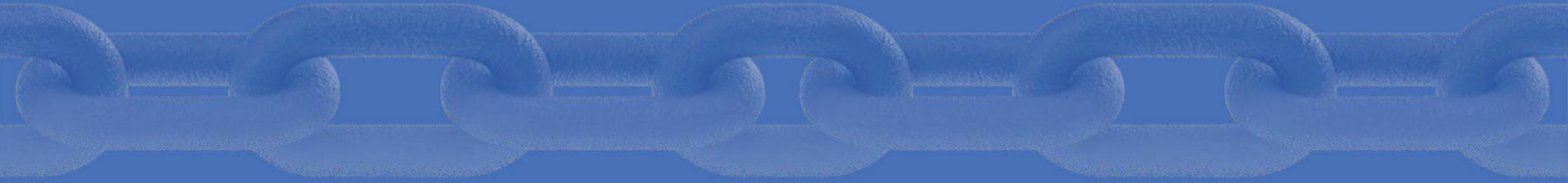
Hasil menunjukkan bahwa kualitas dan penggunaan data di kab/kota PilihanKu membaik antara *baseline* ke *endline*. Dampak terutama terlihat pada peningkatan penggunaan kartu stok, hal yang sederhana tapi mendasar dalam manajemen stok yang baik. Melalui pelatihan, pendampingan dan instruksi kerja, tim PilihanKu bekerja bersama petugas di BKKBN provinsi dan petugas di OPD KB kab/kota untuk meningkatkan kapasitas sambil menekankan pentingnya data dan pemantauan rantai pasok.

Untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data, disarankan agar provinsi memberi dukungan kepada kab/kota dalam melatih dan mendampingi petugas menggunakan kartu stok, menekankan pentingnya penggunaan data untuk pelaporan dan pengambilan keputusan mengenai pasokan ulang. Selain pelatihan, penting juga ada dana yang memadai untuk mencetak kartu stok. Mata anggaran yang ada untuk ATK (alat tulis kantor) dapat dipakai untuk ini. Melalui pelatihan MIM Tool dan TPK, petugas dapat terus menggunakan dan menilai data agar praktek rantai pasok sehari-hari dapat membaik. Semakin petugas memanfaatkan data, semakin pula ia akan menghargai arti data dan mengapa kualitas data sungguh penting. Akhirnya, disarankan untuk menerapkan sistem informasi manajemen gudang digital agar efisien sekaligus menaikkan tingkat pelaporan dan kualitas data. Saat ini entri data dilakukan secara manual ke beberapa pencatatan yang memakan waktu dan duplikatif.

Kunjungan berulang menggunakan pendekatan pendampingan terstruktur terbukti efektif untuk meningkatkan akurasi catatan dan laporan stok. Gambar 44 mengilustrasikan data yang diperoleh melalui pendampingan yang menunjukkan bagaimana keterampilan meningkat setelah tiap kunjungan.

Gambar 44: Hasil kunjungan rutin dari mentor terhadap penggunaan dan akurasi kartu stok (data pemantauan)





VI.

Penyimpanan

Temuan

Standar kondisi penyimpanan yang tepat harus dipenuhi agar alokon tetap terjaga kualitas dan efektivitasnya. Dalam asesmen tempat penyimpanan alokon, pengumpul data dilengkapi dengan daftar indikator syarat utama penyimpanan, dan mereka harus mengamati apakah tiap indikator tersebut terpenuhi.

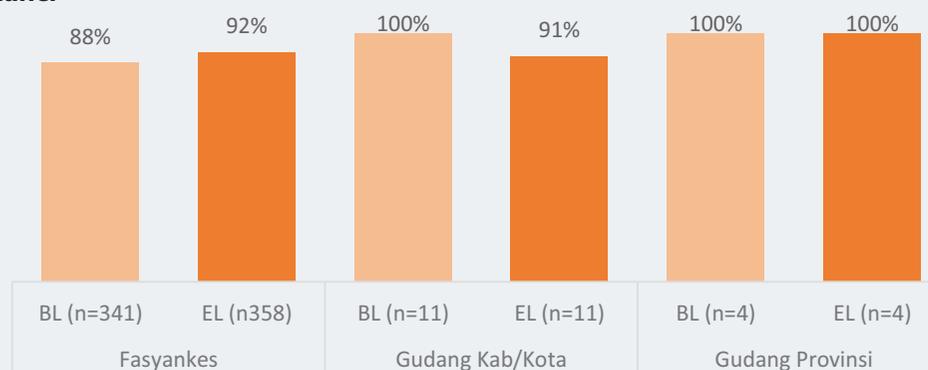
Pengumpul data mengamati dan mencatat 14 syarat penyimpanan yang berbeda, dan untuk mencapai 70% dari syarat yang dianggap penting, fasilitas harus memenuhi minimal 10 dari 14 syarat penyimpanan tersebut. Untuk fasilitas yang memiliki karton box bersusun di penyimpanan, mereka harus memenuhi minimal 12 dari 17 syarat penyimpanan.



Gudang Provinsi DKI Jakarta

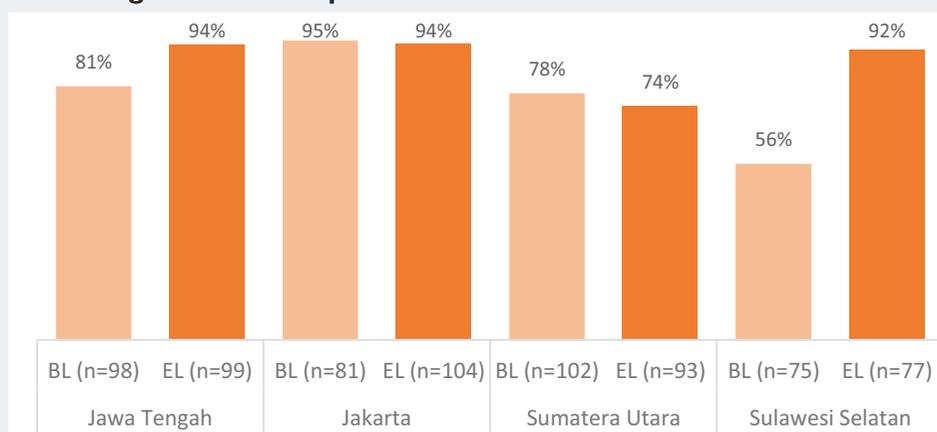
Kondisi penyimpanan saat baseline secara umum sudah cukup baik, yaitu di atas 80%. Saat endline terlihat peningkatan dengan lebih dari 90% fasyankes dan gudang mencapai minimal 70% dari kondisi penyimpanan yang kunci; (Gambar 45).

Gambar 45: Persen fasilitas yang memenuhi 70% kondisi penyimpanan kunci



Perbaikan terbesar dalam kondisi penyimpanan terlihat di Sulawesi Selatan di mana 92% fasyankes memenuhi 70% dari syarat utama penyimpanan. Padahal ketika baseline hanya 56% fasyankes yang memenuhi syarat penyimpanan.

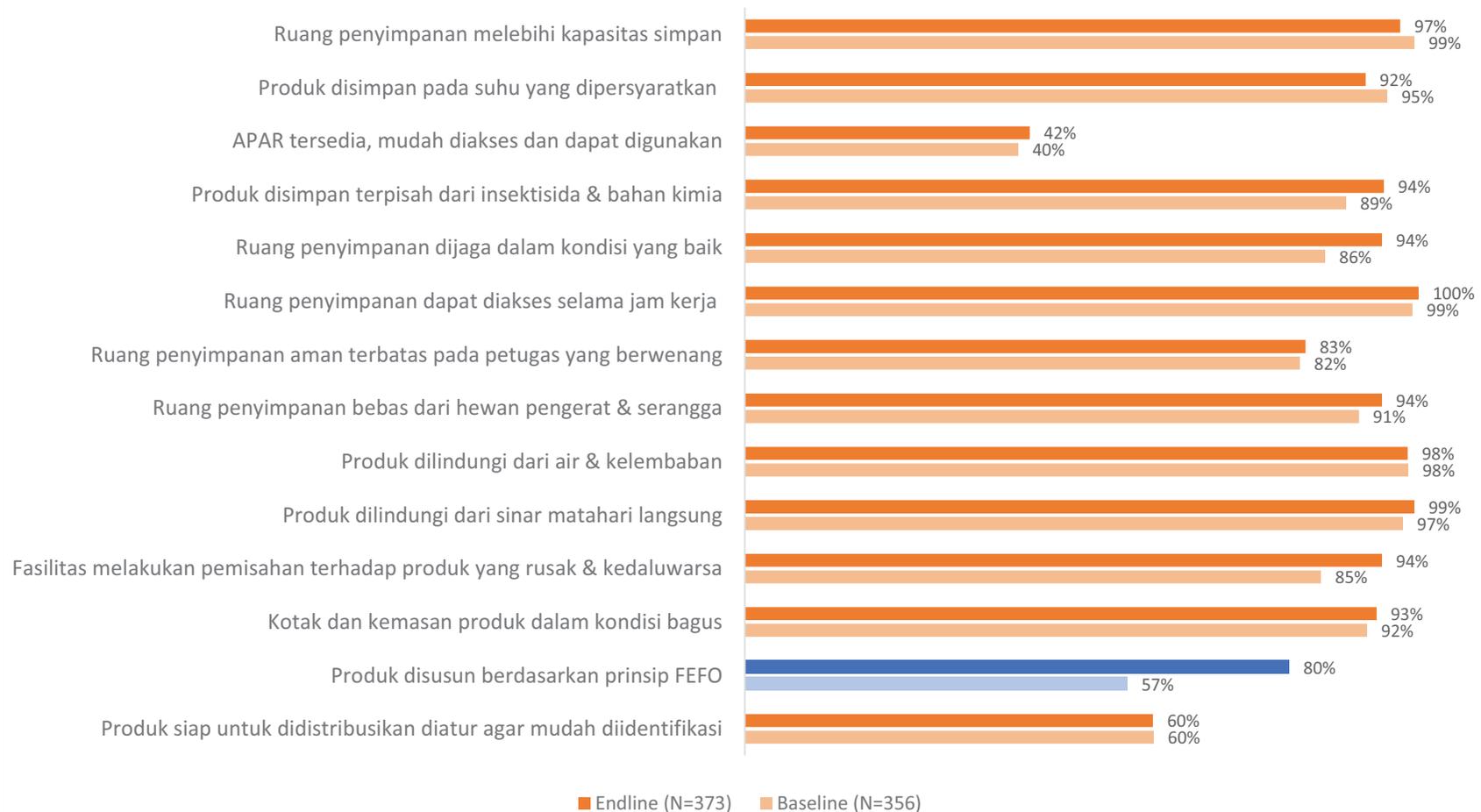
Gambar 46: Persen fasilitas yang memenuhi 70% kondisi penyimpanan kunci dibagi berdasarkan provinsi



Temuan

Gambar 47: Persen fasilitas yang memenuhi setiap dari 14 syarat utama penyimpanan

Perbaikan terbesar dalam kondisi penyimpanan di fasilitas adalah dalam kepatuhan terhadap prosedur *First to Expire, First Out (FEFO)*. Di *baseline*, hanya 57% fasilitas mempraktekkan FEFO – dan peningkatan mencapai hampir 40%. Hal ini kemungkinan karena pelatihan, pendampingan serta poster mengenai penyimpanan yang dikembangkan proyek-



Temuan

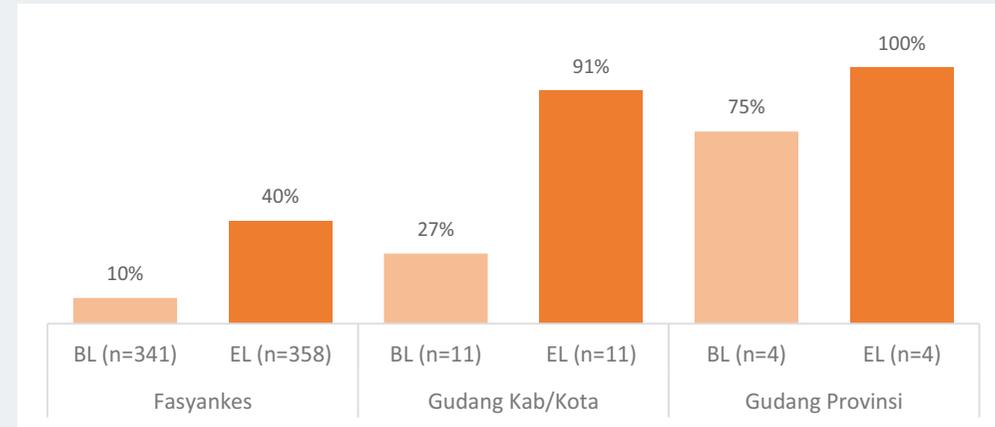
MEKANISME PENGENDALIAN SUHU

Alokon perlu disimpan di suhu yang tepat untuk menjaga kualitas dan efektivitasnya. Untuk mengukur ini PilihanKu melihat pada beberapa faktor: apakah fasilitas memiliki alat pemantau suhu, apakah ada mekanisme pengendalian suhu seperti alat pendingin ruangan yang berfungsi, kipas angin atau ventilasi melalui jendela, dan apakah pada hari survei suhu penyimpanan tepat sesuai panduan untuk alokon.

Hasil *endline* menunjukkan 42% faskes sudah memiliki alat pemantau suhu. Ini merupakan peningkatan dari *baseline* yang hanya 11% ($p < 0.001$). Pengamatan akan ada/tidaknya mekanisme pengendalian suhu dan ketepatan suhu penyimpanan di hari kunjungan menunjukkan peningkatan dari yang hanya 10% di *baseline* menjadi 50% di *endline* untuk semua fasyankes; Seperti terlihat di Gambar 48, semua jenis faskes menunjukkan perbaikan dalam indikator ini.

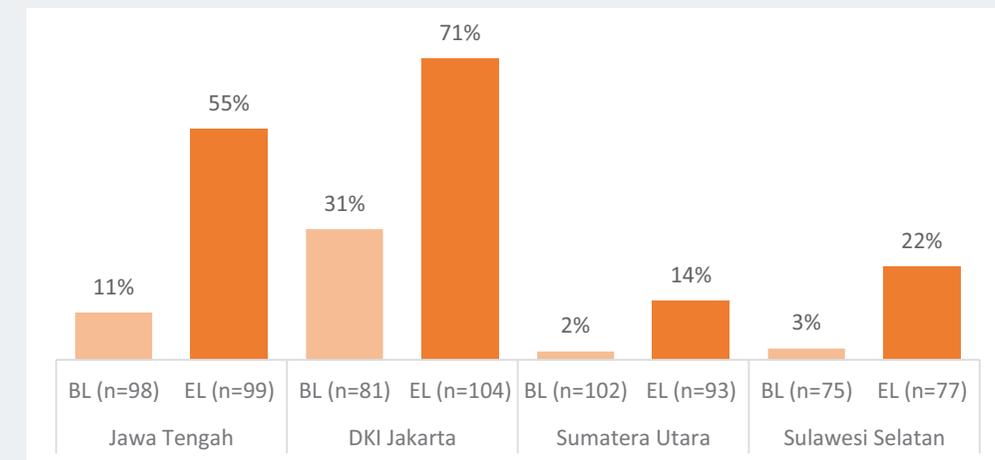


Gambar 48: Persen fasilitas dengan mekanisme pengendalian suhu yang berfungsi dan suhu penyimpanan yang tepat dibagi berdasarkan jenis fasilitas



Perbaikan dalam ketersediaan alat pengendalian suhu yang berfungsi juga terlihat di semua provinsi. Peningkatan paling signifikan terlihat di Jawa Tengah.

Gambar 49: Persen fasilitas dengan mekanisme pengendalian suhu yang berfungsi dan suhu penyimpanan yang tepat dibagi berdasarkan provinsi

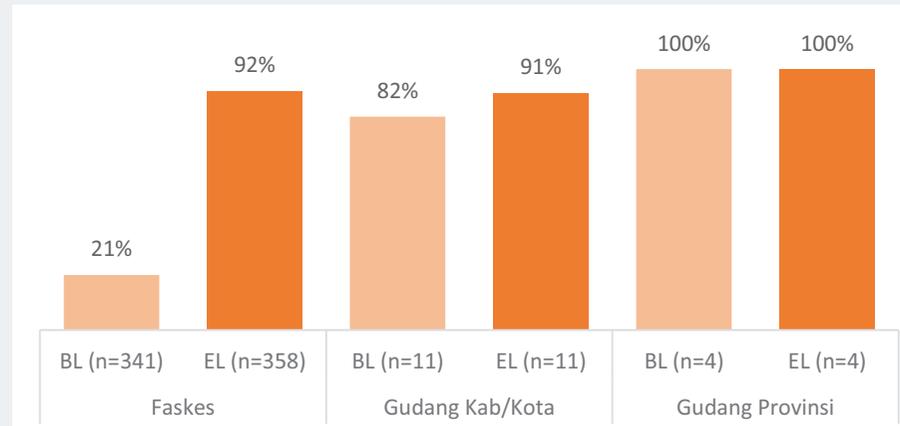


Temuan

PELATIHAN MENGENAI PENYIMPANAN

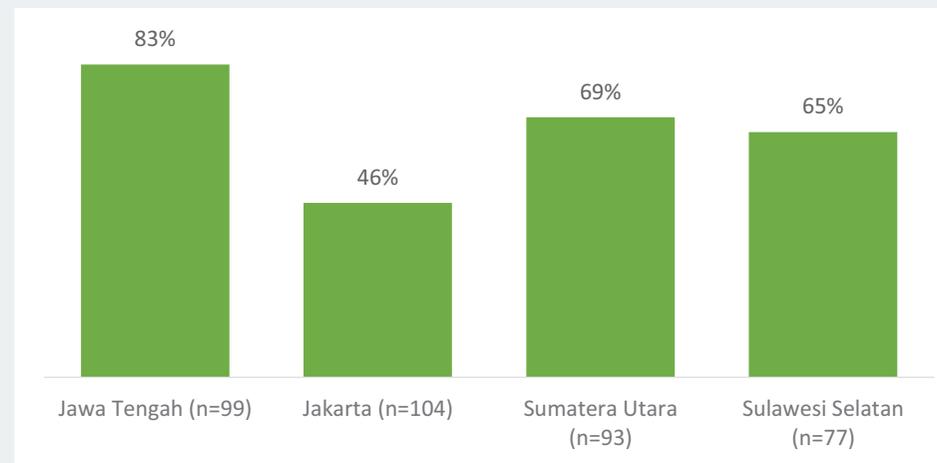
Untuk menjaga standar penyimpanan alokon, maka petugas perlu dilatih mengenai prosedur penyimpanan yang tepat. Saat *baseline* hanya 24% responden survei mengatakan telah dilatih dalam prosedur penyimpanan. Ini meningkat tajam menjadi 92% saat *endline* ($p < 0.001$). Ketika dilihat lebih rinci saat *baseline* 90% responden dari gudang telah dilatih mengenai prosedur penyimpanan, tapi di tingkat fasyankes, petugas yang dilatih hanya 21%. Di *endline* 92% dari petugas fasyankes mengatakan telah dilatih mengenai prosedur penyimpanan. Temuan kualitatif menekankan pentingnya kunjungan monitoring atau Bimtek untuk memperbaiki kondisi penyimpanan. Kunjungan Bimtek membantu petugas menerapkan hal-hal yang mereka pelajari dalam pelatihan.

Gambar 50: Persen petugas yang dilatih mengenai prosedur penyimpanan dibagi berdasarkan jenis fasilitas



Selain pendampingan dan pelatihan, PilihanKu juga mengembangkan poster mengenai penyimpanan untuk ditempelkan di tempat penyimpanan.

Gambar 51: Persen fasilitas yang pada *endline* memiliki poster penyimpanan dibagi berdasarkan provinsi



Rekomendasi

Walaupun kondisi penyimpanan secara umum cukup baik, tapi dari diskusi kualitatif diketahui bahwa masih banyak perbaikan yang perlu diterapkan, terutama dalam hal pengendalian suhu. Beberapa gudang memantau dan mencatat suhu di pagi dan malam hari ketika suhu di tahap terendah, tapi tidak mencatat suhu di tengah hari yang justru mewakili suhu tertinggi yang dialami alokon. Fasilitas lain tidak memiliki alat pemantau suhu yang tepat, sementara lainnya memerlukan bantuan lemari penyimpanan baru atau penggantian alat pendingin (AC) yang rusak untuk memperbaiki kondisi penyimpanan. Perbaikan kondisi penyimpanan masih memerlukan lebih banyak sumber daya dan perhatian.

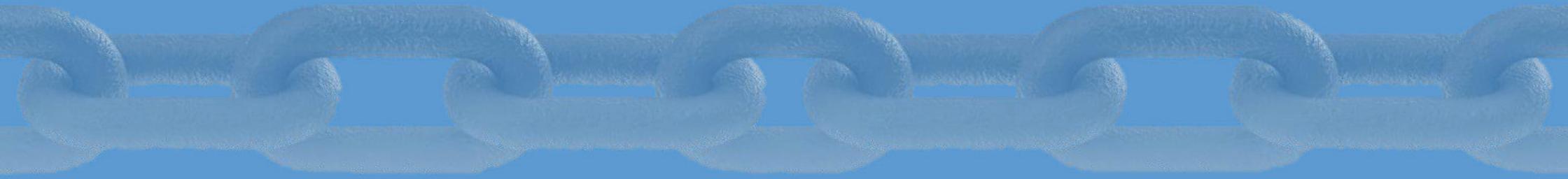
Disarankan agar dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk memastikan praktik terbaik dalam penyimpanan dilaksanakan seperti misalnya prosedur *First to Expire First Out*, dan pemantauan suhu secara benar. PilihanKu mengembangkan poster yang memberi panduan mengenai praktik penyimpanan yang baik di gudang dan fasyankes. Disarankan agar sumber informasi ini disebarluaskan secara luas agar pengguna memiliki pengetahuan yang tepat mengenai penyimpanan. Terakhir, disarankan juga untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk memperbaiki infrastruktur penyimpanan agar fasilitas dapat menyimpan stok di tingkat yang memadai dengan tepat.

Bkkbn **PilihanKu**

PRINSIP PENYIMPANAN ALOKON YANG BAIK

- Bersihkan dan desinfeksi ruang penyimpanan secara teratur**
 - Dilarang mengonsumsi dan menyimpan makanan dan minuman di ruang penyimpanan
 - Patuhi peraturan sanitasi dan pengendalian hama
 - Sediakan tempat pembuangan sampah
- Jaga ruang penyimpanan tetap kering, cukup cahaya dan sirkulasi udara**
 - Hindari alokon dari paparan sinar matahari langsung
 - Gunakan penyejuk ruangan (AC) untuk menjaga suhu sesuai yang dipersyaratkan
 - Atur sirkulasi udara dengan kipas angin, atau *exhaust fan* atau pengaturan ventilasi
- Lindungi ruang penyimpanan dari penetrasi air**
 - Tempatkan alokon di atas palet dan rak, dan bukan di lantai
 - Patuhi prosedur pembersihan ruang penyimpanan
 - Perbaiki atap dan jendela yang bocor
 - Tutup pintu dan jendela untuk mencegah penetrasi air hujan
 - Lakukan pemeliharaan teratur pada pipa, keran dan penyiram air
- Peralatan pemadam kebakaran harus tersedia, mudah diakses, dan berfungsi baik**
 - Peelihara Alat Pemadam kebakaran Ringan (APAR) secara teratur
 - Latih staf menggunakan APAR
 - Peralatan, lorong dan pintu darurat harus dapat diakses setiap saat
 - Dilarang keras merokok di ruang penyimpanan
 - Simpan bahan kimia dan bahan yang mudah terbakar di tempat terpisah
- Simpan produk berbahan karet jauh dari motor listrik, lampu neon dan sinar matahari langsung**
 - Simpan produk berbahan karet (misalnya kondom, sarung tangan) dalam kotaknya karena produk tersebut dapat berangsur rusak bila terpapar cahaya dan panas
- Jaga suhu sesuai yang dipersyaratkan**
 - Masukkan alokon yang diterima ke dalam ruang penyimpanan dingin sesegera mungkin, dan batasi membuka tutup ruang penyimpanan
 - Alokon sebaiknya disimpan di suhu <math>< 25^{\circ}\text{C}</math>
 - Pantau suhu – tiga kali sehari dan gunakan Formulir Monitoring Suhu Harian
 - Gunakan termometer dengan alarm untuk indikasi kegagalan *cold chain*
- Batasi akses ke area penyimpanan hanya bagi petugas yang berwenang**
 - Selalu perbaharui kartu stok
 - Kunci ruang penyimpanan
 - Batasi pemegang kunci dan akses ke ruang penyimpanan
 - Buatlah pencatatan (buku tamu) untuk siapa saja yang mengakses area ini
- Susun kotak sesuai panduan penyimpanan**
 - Kotak/karton harus disimpan:
 - Minimal 10 cm dari lantai
 - 30 cm dari dinding dan tumpukan lain
 - Tinggi tidak lebih dari 3,5m
- Simpan kotak dengan tanda panah menunjuk ke atas**
 - Label identifikasi, nomor bets, tanggal kedaluwarsa dan tanggal produksi harus jelas terlihat
 - Bila ruang terbatas, atur kotak menurut tanggal kedaluwarsa dan sesuai keseragaman nomor batch
- Simpan dan kelola alokon sesuai prinsip First Expired, First Out (FEFO)**
 - Pastikan tanggal kedaluwarsa tertulis dan terlihat jelas di kemasan, kotak dan kartu stok
 - Letakkan alokon kedaluwarsa lebih awal di depan atau di atas alokon yang kedaluwarsa belakangan
 - Selalu keluarkan alokon yang lebih dekat kedaluwarsanya terlebih dahulu
 - Pantau tanggal kedaluwarsa sebagai bagian dari perhitungan fisik bulanan
- Jauhkan alokon dari produk lain yang berisiko kontaminasi**
 - Jauhkan alokon dari racun serangga, bahan kimia dan produk non-medis lainnya
- Pisahkan alokon yang rusak dan kedaluwarsa**
 - Identifikasi dan keluarkan alokon yang rusak/ kedaluwarsa dari pencatatan kartu stok yang masih baik, dengan keterangan "rusak/ kedaluwarsa"
 - Pisahkan fisiknya dan beri tanda "rusak/ kedaluwarsa" dan buatlah kartu stok khusus untuk pencatatannya
 - Perbaharui pelaporan dan tindak lanjut prosedur penghapusan

Poster Penyimpanan untuk Gudang



VII. Monitoring dan Supervisi

Temuan

Untuk menangani kegiatan rantai pasok, petugas perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab mereka sekaligus pengetahuan, keterampilan dan alat bantu untuk menjalankan tugas mereka. Semua ini berlandaskan keinginan untuk melakukan tugas mereka secara konsisten.

Temuan kualitatif dari *LSAT* yang dilakukan saat *baseline* menunjukkan bahwa kendala organisasi dan petugas terutama berkisar pada keterbatasan SDM terkait dengan mutasi petugas yang tinggi, peluang untuk memperoleh pelatihan rantai pasok yang minim, ketiadaan panduan atau alat bantu yang spesifik dan relevan di semua tingkat, juga minimnya koordinasi dan komunikasi antar tingkat, terutama antara tingkat kab/kota dan fasyankes.

Saat pembahasan di *baseline*, motivasi dan insentif tidak disebutkan sebagai penghambat tugas. Petugas kab/kota dan provinsi umumnya memiliki motivasi dan ingin menjalankan tugas tanggung jawab mereka serta membantu masyarakat. Beberapa petugas mengatakan mereka termotivasi oleh peluang seperti pelatihan lebih lanjut. Hanya sedikit petugas yang menyebutkan insentif keuangan sebagai motivasi utama mereka.

Untuk mengatasi isu ini, PilihanKu menerapkan intervensi yang mencakup monitoring dan kunjungan supervisi/bimtek, tim peningkatan kualitas serta alat bantu lain untuk mendukung petugas melakukan tugasnya seperti misalnya video tutorial berisi instruksi kerja dan Group *WhatsApp*. Tiap intervensi proyek memiliki dampak pada kinerja provinsi, kab/kota dan fasyankes yang mengelola rantai pasok, juga pada kinerja para individu yang bekerja dalam instansi tersebut. Seperti disampaikan dalam pengumpulan data kualitatif, standarisasi prosedur inventaris, pencatatan dan pelaporan serta pelatihan memberi petugas rasa keyakinan diri, juga pengetahuan dan struktur yang dibutuhkan untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka, sekaligus keterampilan untuk menjalankan tugas mereka. Supervisi pendukung / bimtek memberi petugas motivasi dan meningkatkan kinerja mereka, sementara tim peningkatan kualitas memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar tingkat serta pemecahan masalah secara kolaboratif.



Kunjungan supervisi pendukung/bimtek ke sebuah fasyankes di Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

Temuan

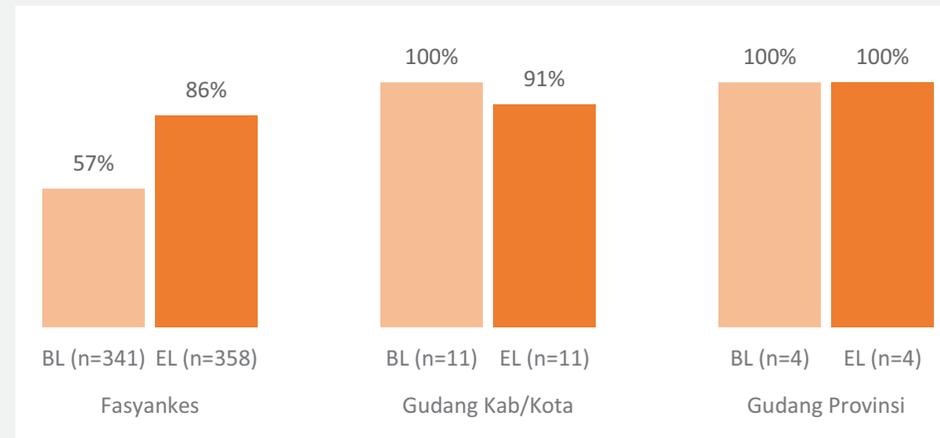
SUPERVISI/BIMTEK

Supervisi pendukung/bimtek secara rutin mengenai praktik logistik (dengan daftar tilik atau *checklist* standar dan umpan balik tepat waktu kepada petugas) adalah satu cara penting untuk menekankan pelatihan, mendorong kepatuhan kepada prosedur sistem logistik dan meningkatkan motivasi petugas.

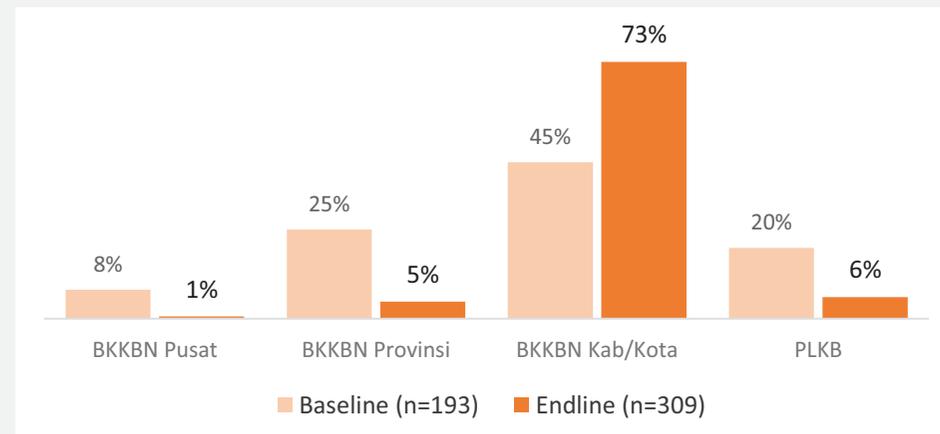
Di *baseline*, hanya 57% dari fasyankes yang menerima kunjungan bimtek mengenai KB atau pengelolaan rantai pasok. Di *endline*, sekitar 86% fasyankes telah menerima kunjungan bimtek – peningkatan sebesar hampir 30% dari *baseline* ke *endline*, seperti terlihat di Gambar 52. Kunjungan bimtek ke gudang kab/kota mengalami sedikit penurunan (100% menjadi 91%).

Petugas yang melakukan kunjungan bimtek antara *baseline* dan *endline* sedikit berubah. Di *baseline* pelaku kunjungan bimtek untuk rantai pasok KB ke fasyankes sangat bervariasi dan tidak terkait dengan jenis fasyankes. Pada *endline* mayoritas fasyankes mengatakan bahwa kunjungan bimtek dilakukan oleh OPD KB di kab/kota (86% dari rumah sakit (swasta maupun pemerintah); 68% klinik swasta; dan 73% pukesmas).

Gambar 52: Persen fasilitas yang menerima kunjungan bimtek (keluarga berencana atau pengelolaan rantai pasok alokon)



Gambar 53: Siapa yang melakukan kunjungan bimtek terakhir



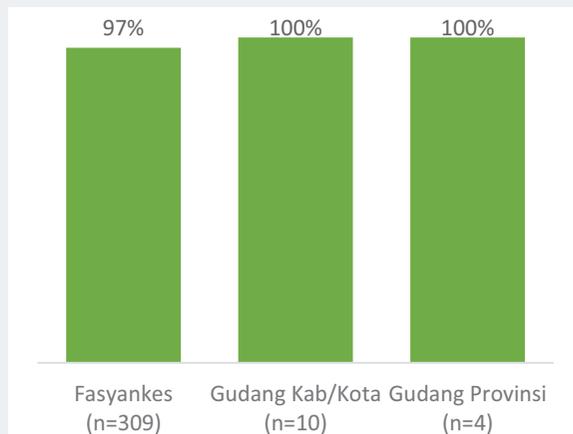
Penting diingat, jawaban atas pertanyaan yang diajukan saat *baseline* beragam, sementara di *endline* pertanyaan hanya memiliki satu jawaban. Jadi di *baseline* mungkin ada beberapa jawaban yang digabung, sehingga sulit untuk sungguh membandingkan kondisi *baseline* dan *endline*.

Temuan

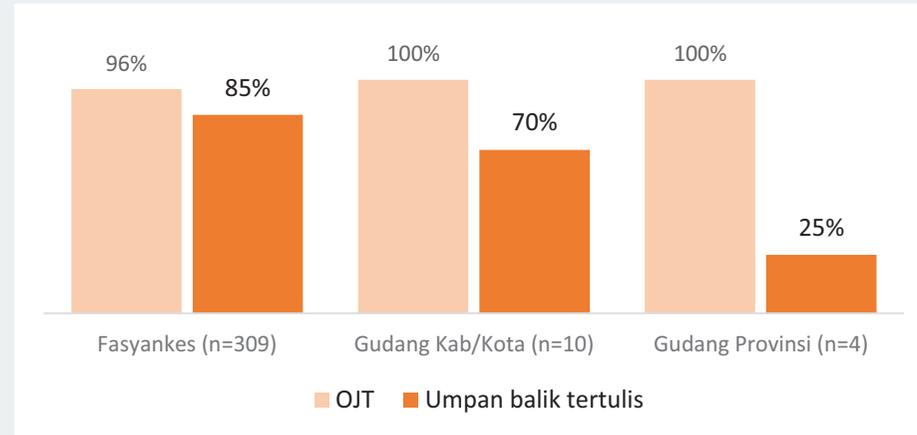
Saat *endline*, responden diminta memberi rincian lebih lanjut mengenai bimtek yang mereka terima, terutama mengenai pemberian pelatihan *on-the-job* (OJT) dan pemberian umpan balik saat bimtek terakhir. Semua ini merupakan intervensi utama dari proyek. Sebagaimana terlihat di Gambar 53, OJT dilaporkan oleh sebagian besar fasyankes dan gudang. Umpan balik tertulis saat bimtek terakhir lebih jarang diberikan daripada OJT, tapi juga dilaporkan oleh sebagian besar fasyankes dan gudang kab/kota.

Ketika ditanya apakah pelatihan dan umpan balik bermanfaat, praktis semua fasyankes dan gudang mengatakan ya, pelatihan dan umpan balik saat bimtek bermanfaat bagi mereka. Lihat Gambar 54.

Gambar 54: Fasilitas saat *endline* yang merasa OJT dan umpan balik bermanfaat dibagi berdasarkan jenis fasilitas



Gambar 55: Fasilitas yang menerima OJT dan umpan balik tertulis di bimtek terakhir dibagi berdasarkan jenis fasilitas



Pelatihan *on-the-job* (OJT) saat kunjungan bimtek di Cilacap, Jawa Tengah,

Temuan

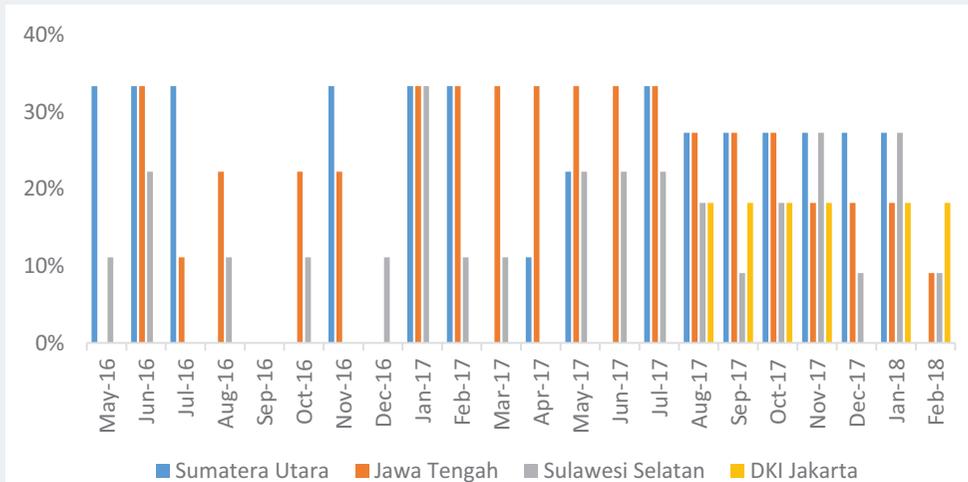
TIM PENINGKATAN KUALITAS (TPK)

TPK diimplementasikan di tingkat provinsi dan kab/kota. Tujuan TPK adalah meningkatkan pemanfaatan data logistik secara rutin untuk pengambilan keputusan mengenai rantai pasok, seperti misalnya untuk estimasi kebutuhan yang lebih baik, juga monitoring dan manajemen kinerja. Anggota TPK memiliki tujuan dan tanggung jawab bersama untuk mengkaji data, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.

TPK dirancang untuk bertemu tiap bulan di masing-masing tingkatan di provinsi dan kab/kota. Akan tetapi jadwal kegiatan yang padat membuat hal ini sulit terlaksana, bahkan ketika proyek masih memberi dukungan. Rata-rata TPK di tingkat kab/kota mengadakan rapat 61% dari frekuensi yang direncanakan sedangkan TPK provinsi hanya bertemu 18% dari frekuensi yang direncanakan. Setelah asesmen *mid term*, di mana pentingnya pertemuan TPK ini ditekankan, frekuensi pertemuan TPK di kab/kota naik dari 39% ke 82%. Akan tetapi di tingkat provinsi, frekuensi pertemuan TPK masih tetap sama yaitu 21% sebelum asesmen *mid term* dan 18% sesudahnya.

Gambar 55 menunjukkan fluktuasi frekuensi rapat TPK di kab/kota selama pelaksanaan proyek. DKI Jakarta baru mulai mengimplementasikan TPK di bulan Agustus 2017 dan antara bulan Agustus dan Februari 6 pertemuan TPK diadakan dari 7 bulan pelaksanaan.

Gambar 56: Persentase pertemuan TPK Kab/Kota yang diharapkan di keempat provinsi



Data kualitatif menyorot beberapa keberhasilan yang dicapai TPK sebagai hasil kajian data dan pemecahan masalah secara setempat. Saat pertemuan TPK itulah ditemukan bahwa beberapa fasyankes memiliki stok alokon yang telah kedaluwarsa yang masih diikutsertakan dalam laporan stok mereka. Akibatnya jumlah pasokan ulang yang dihitung oleh MIM tool nampak rendah karena faskes seolah-olah memiliki stok yang lebih banyak daripada yang sesungguhnya. TPK segera mengambil tindakan untuk memusnahkan alokon yang sudah kedaluwarsa dan membimbing fasyankes agar melakukan pelaporan dengan benar. Banyak TPK juga memanfaatkan pertemuan TPK untuk mengkaji tingkat ketersediaan di fasyankes, mengidentifikasi fasyankes yang memiliki stok berlebih di atas titik realokasi, sekaligus fasyankes di dekatnya yang mengalami kekurangan stok agar realokasi dapat dilaksanakan dan mengurangi risiko terjadi *stockout* dan terbuangnya alokon.

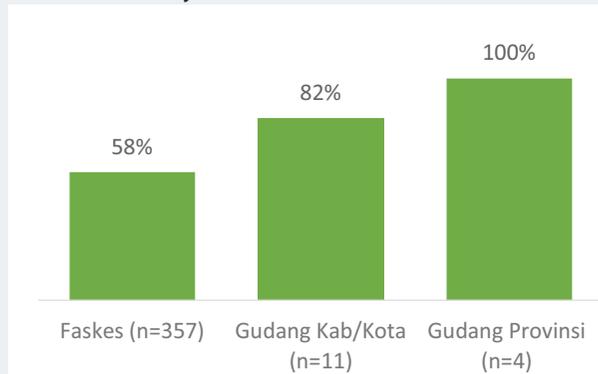
Diskusi kualitatif juga menyorot bahwa melalui TPK kapasitas pemangku kepentingan untuk melakukan analisis dan interpretasi data dengan alat bantu manajemen inventaris meningkat. Berkat TPK dan hasil proyek, Provinsi menaikkan anggaran mereka untuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen rantai pasok dan rantai pasok keluarga berencana kini memiliki nilai tambah di semua bagian.

Temuan

GROUP WHATSAPP

PilihanKu memfasilitasi pembentukan group *WhatsApp* untuk memudahkan komunikasi dan memperkuat hubungan antar pengguna di tiap tingkatan; kelompok ini melengkapi intervensi penguatan rantai pasok lainnya. Petugas menggunakan platform ini untuk mengirimkan laporan, kartu stok, surat revisi kebijakan dan berbagai dokumen via foto. Saat *endline* hampir 60% dari responden fasyankes, 82% responden kab/kota dan 100% responden provinsi menjadi bagian dari group *WhatsApp*. Keterlibatan tiap individu bervariasi antar daerah. Group *WhatsApp* terutama disambut baik di Jawa Tengah di mana lebih dari 90% fasyankes mengaku menjadi bagian dari group *WhatsApp*. Di Jakarta hanya 7% fasyankes memanfaatkan group *WhatsApp*.

Gambar 57: Persen fasilitas di *endline* yang menjadi bagian dari group *WhatsApp* dibagi berdasarkan jenis fasilitas



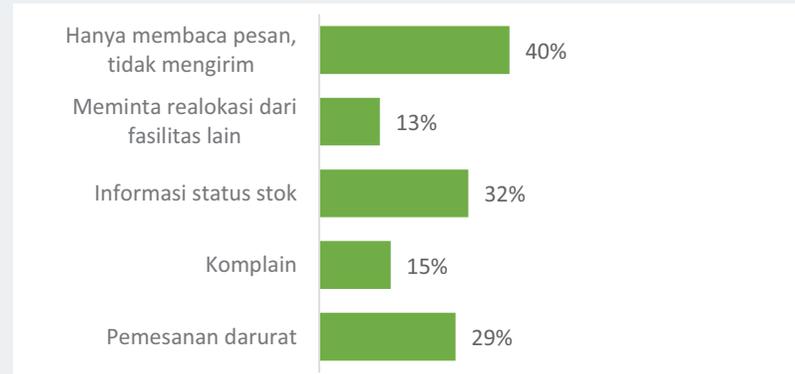
Hasil kualitatif menunjukkan bahwa di Brebes, forum *WhatsApp* ini dipakai untuk manajemen inventaris. Ketika ditanya mengenai informasi apa yang dikirimkan melalui *WhatsApp*, mayoritas responden mengatakan mereka mengirim informasi terbaru tentang stok rasio atau tingkat persediaan, dan mengajukan permintaan darurat. Akan tetapi, banyak fasilitas (40%) mengatakan mereka tidak mengirim pesan, dan hanya membaca pesan (Gambar 56).

Gambar 58: Jenis informasi yang diterima di group *WhatsApp* di *endline* (n=219)



Responden juga ditanya mengenai jenis informasi yang mereka terima; jawabannya mencakup pengingat, umpan balik, informasi tentang EOP dan RP. Kurang dari 7% responden mengatakan menerima tutorial video melalui *WhatsApp* (Gambar 58).

Gambar 59: Jenis informasi yang dikirim ke group *WhatsApp* di *endline* (n=219)



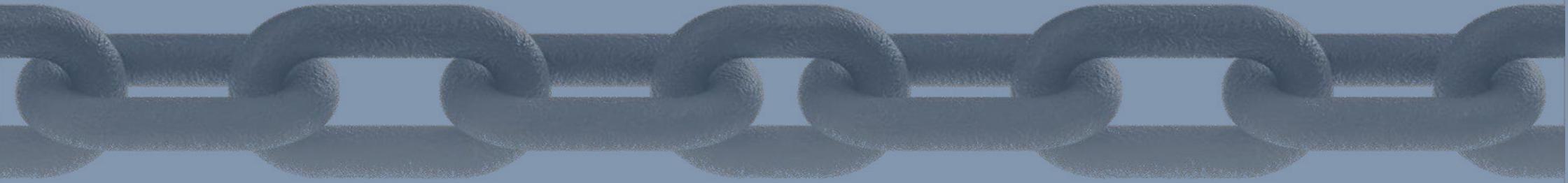
Rekomendasi

Saat wawancara kualitatif, petugas provinsi dan kab/kota mengemukakan betapa penting peran bimtek dan OJT dalam meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan serta meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur manajemen inventaris dan penyimpanan. Petugas mengatakan bahwa bimtek dan OJT tidak hanya penting untuk aspek manajemen kinerja, tapi juga meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar tingkat.

Pelatihan *on-the-job* dan pelatihan di ruang kelas juga meningkatkan motivasi dan semangat petugas, sementara group *WhatsApp* menjadi mekanisme yang baik untuk memberi masukan dan jawaban secara cepat terhadap permintaan darurat. Petugas menyampaikan bahwa padatnya kegiatan dan keterbatasan dana untuk melakukan kunjungan merupakan salah satu tantangan dalam melaksanakan bimtek. Mereka juga mengatakan bahwa frekuensi bimtek tidaklah sepenting kualitas dari kunjungan bimtek itu sendiri yang mencakup pemecahan masalah bersama, pelatihan *on-the-job*, dan penggunaan formulir umpan balik.

Berdasarkan data dan diskusi yang dilakukan, untuk masa mendatang PilihanKu menyarankan hal-hal berikut ini:

- Kunjungan supervisi pendukung (bimtek) rutin direncanakan dan dianggarkan di semua tingkatan
- Agar lebih memungkinkan, kunjungan bimtek dapat digabung dengan kegiatan lain. Akan tetapi, perlu disediakan waktu yang cukup untuk menjaga kualitas bimtek dan melakukan pelatihan *on-the-job* sesuai kebutuhan
- Tim peningkatan kualitas bertemu secara rutin di tingkat provinsi dan kab/kota untuk mengkaji data *eLMIS*, mengambil keputusan mengenai pasokan ulang dan memastikan adanya koordinasi yang baik antar divisi yang berbeda
- Group *WhatsApp* dibentuk dan petugas didorong untuk memanfaatkan kelompok ini sebagai cara untuk meningkatkan komunikasi dan mendorong koneksi antar fasyankes-kab/kota dan kab/kota-provinsi
- BKKBN perlu mengidentifikasi beberapa indikator kunci rantai pasok dan mengembangkan perangkat *dashboard* untuk pengguna di semua tingkat. Ini memungkinkan visibilitas data dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan rantai pasok secara kontinu.

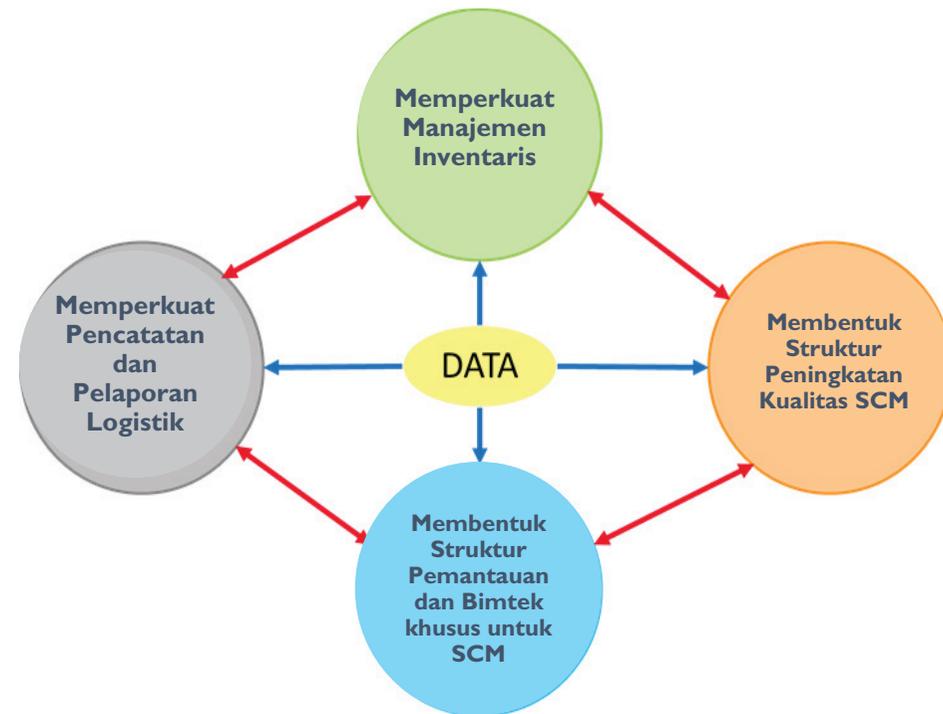


Kesimpulan dan Langkah ke Depan

Kesimpulan

Laporan ini berisi berbagai rekomendasi, yang berasal dari temuan kualitatif dan kuantitatif di evaluasi *endline*. Setelah asesmen *baseline* pada awal proyek tim PilihanKu bersama pemangku kepentingan merancang paket intervensi rantai pasok yang menyeluruh dan berpusat pada data untuk mengatasi beberapa kesenjangan penting yang ada dalam sistem. Paket intervensi ini berisi empat intervensi kunci yang dipandu oleh tiga tema inti – penguatan kapasitas organisasi, kolaborasi dan akuntabilitas, serta menanamkan budaya penggunaan data untuk perbaikan rantai pasok secara kontinu. Paket intervensi ini menerapkan pendekatan berbasis sistem yang memperkuat tenaga kerja rantai pasok di tiap tingkat, memberdayakan mereka dengan alat bantu baru, keterampilan dan informasi yang memungkinkan perbaikan rantai pasok berjalan secara holistik dan kontinu.

Bidang-bidang intervensi ini terbukti meningkatkan praktik rantai pasok yang utama melalui peningkatan kualitas data, peningkatan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dan penguatan koordinasi serta komunikasi antar tingkat dan divisi yang terlibat dalam rantai pasok. Yang terutama penting adalah bahwa hasil implementasi menunjukkan pentingnya berinventarisasi dan memperkuat rantai pasok agar fasyankes dapat memperoleh alokasi yang mereka butuhkan dengan cara yang terstandar, efisien dan efektif.



Selama implementasi kami melihat bahwa Pengelola program KB dan dan fasyankes yang rutin menerapkan intervensi proyek memiliki hasil rantai pasok yang lebih baik. Provinsi, kab/kota dan fasyankes perlu belajar dari keberhasilan dan pembelajaran yang telah dicapai dan memastikan bahwa inisiatif penguatan rantai pasok ini dilembagakan dan menjadi bagian dari kegiatan mereka sehari-hari.

Langkah ke Depan

Untuk ke depan, PilihanKu akan memberi bantuan teknis ke tingkat pusat, provinsi dan kab/kota agar kegiatan ini dapat terus bertahan di I I kab/kota awal sekaligus mereplikasi intervensi ini ke kab/kota lainnya. Untuk fase berikutnya, PilihanKu akan memanfaatkan keberhasilan dan pembelajaran yang diperoleh dari implementasi di I I kab/kota untuk menjangkau pemangku kepentingan yang lebih luas. Bantuan teknis yang diberikan proyek akan berfokus pada bidang-bidang berikut ini:

Kebijakan Rantai Pasok: Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, PilihanKu akan terus mendukung BKKBN mengkaji dan merevisi sekaligus menyusun berbagai panduan rantai pasok untuk keluarga berencana, termasuk panduan yang berkaitan dengan kuantifikasi, perencanaan distribusi, manajemen alokasi di semua tingkat dan pemantauan rantai pasok.

Rancangan Pelatihan: Agar kebijakan baru dapat disebarkan dengan tepat dan dipatuhi perlu dilakukan investasi untuk pelatihan dan pemantauan secara menyeluruh. PilihanKu akan mendukung penyusunan SOP dan instruksi kerja untuk membantu pengguna menerapkan kebijakan baru yang dikeluarkan. Selain itu, dukungan untuk pengembangan kurikulum dan peningkatan kapasitas pelatih akan membantu agar panduan dapat diluncurkan dengan baik.

Manajemen Inventaris & Pemantauan Rantai Pasok: Sistem kontrol inventaris yang efektif mengharuskan pemangku kepentingan untuk menerapkan sistem secara seragam. MIM Tool membuat perhitungan pasokan ulang menjadi terstandar dan menelusuri beberapa indikator kinerja rantai pasok. Untuk mendukung upaya replikasi ke wilayah lain, PilihanKu mengembangkan MIM Tool berbasis web untuk digunakan oleh provinsi atau kab/kota di Indonesia. Perangkat tersebut juga memudahkan pemantauan kinerja rantai pasok untuk tiap tingkat dalam sistem.

Digitisasi Pengelolaan Gudang: Selama implementasi fase pertama proyek, pengamatan menunjukkan bahwa gudang tidak dikelola secara optimal. Pengelola gudang harus mengisi berbagai formulir secara manual sehingga sering terjadi duplikasi informasi dan duplikasi dokumen dengan risiko kesalahan dalam entri data. PilihanKu menekankan pentingnya kualitas data dalam semua intervensi dan yakin hal ini merupakan kesenjangan yang signifikan. Digitisasi proses pengelolaan gudang akan mengurangi beban pada pengguna sekaligus meningkatkan tingkat pelaporan dan kualitas data. Mengingat penetrasi ponsel pintar cukup tinggi di Indonesia, PilihanKu akan mengembangkan aplikasi manajemen gudang dan mencobanya dalam bentuk percontohan. Aplikasi tersebut membantu memudahkan penerimaan, penyimpanan dan distribusi alokasi.

Advokasi Rantai Pasok: Praktik rantai pasok yang tangguh hanya dapat dibentuk dan dipertahankan bila ada investasi yang terus-menerus untuk sistem rantai pasok. Untuk itu diperlukan investasi keuangan dan komitmen dari pemangku kepentingan di semua tingkat agar masyarakat Indonesia memiliki akses ke serangkaian pilihan kontrasepsi setiap saat. PilihanKu akan terus mengadvokasi di berbagai forum untuk perbaikan praktik rantai pasok.



Appendiks

Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1	Proses Peningkatan Rantai Pasok
Gambar 2	Persentase fasyankes yg mengalami stockout di hari evaluasi
Gambar 3	Persentase fasyankes dengan stok memadai (0,5 - 5 bulan) di hari evaluasi
Gambar 4	Kab/Kota PilihanKu vs. lokasi lain di Indonesia
Gambar 5	Penggunaan dan akurasi kartu stok di fasyankes
Gambar 6	Sampel fasyankes yang terdaftar di BKKBN
Gambar 7	results tracker PilihanKu
Gambar 8	Persentase fasyankes yang memiliki stok semua metode KB yang mereka tawarkan di hari kab/kota melakukan kunjungan
Gambar 9	Persentase fasyankes yang mengalami stockout, berdasarkan metode di hari kunjungan
Gambar 10	Perbandingan rasio bulan ketersediaan stok saat ini di gudang dengan tingkat stockout di fasyankes pada baseline
Gambar 11	Perbandingan rasio bulan ketersediaan stok saat ini di gudang dengan tingkat stockout di fasyankes pada endline
Gambar 12	Tingkat ketersediaan (stok Rasio) di Fasyankes, per metode
Gambar 13	Tingkat stockout di Fasyankes (rata-rata untuk semua metode)
Gambar 14	Persentase fasyankes yang memiliki pedoman/instruksi kerja berdasarkan jenis faskes
Gambar 15	Persentase fasyankes yang mengatakan tingkat yang lebih tinggi menentukan jumlah alokon yang akan dipasok dibagi berdasarkan jenis fasyankes
Gambar 16	Persentase fasyankes yang mengatakan tingkat yang lebih tinggi menetapkan jumlah pasokan alokon dibagi berdasarkan provinsi
Gambar 17	Bagaimana jumlah pasokan ulang ditetapkan untuk fasyankes di tingkat lebih bawah
Gambar 18	Persentase fasilitas yang mengalami kesulitan memperoleh alokon dibagi berdasarkan jenis fasilitas
Gambar 19	Alasan yang disampaikan pada evaluasi endline terkait dengan kesulitan memperoleh alokon
Gambar 20	Persen fasilitas yang memiliki cara mengajukan permintaan darurat dan memiliki prosedur untuk itu
Gambar 21	Tingkat stok di mana fasyankes yang memiliki prosedur permintaan darurat mengajukan permintaan darurat
Gambar 22	Jumlah permintaan darurat yang diajukan dalam 6 bulan terakhir
Gambar 23	Persentase fasyankes yang memiliki cara untuk mengajukan permintaan darurat dibagi berdasarkan jenis fasyankes
Gambar 24	Cara mengajukan permintaan darurat ke tingkat yang lebih tinggi dibagi berdasarkan provinsi
Gambar 25	Fasilitas yang memiliki jadwal distribusi dibagi berdasarkan provinsi
Gambar 26	Seberapa sering fasyankes dan gudang kab/kota harus menerima alokon
Gambar 27	Seberapa sering fasyankes sesungguhnya menerima alokon
Gambar 28	Fasyankes yang mengatakan menerima alokon tiap dua bulan dibagi berdasarkan jenis fasyankes

Daftar Gambar dan Tabel

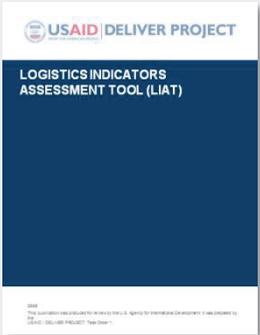
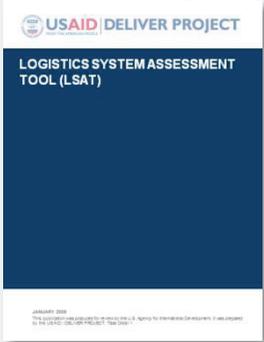
Gambar 29	Fasilitas yang mengatakan pasokan tiba tepat waktu
Gambar 30	Fasilitas yang mengatakan selalu menerima pasokan tepat waktu dibagi berdasarkan provinsi
Gambar 31	Fasilitas di <i>endline</i> yang diberitahu oleh tingkat lebih tinggi bahwa mereka akan menerima alokon dibagi berdasarkan jenis faskes
Gambar 32	% fasyankes yang mengalami <i>stockout</i> dibandingkan bila distribusi dilaksanakan sesuai jadwal (tiap dua bulan)
Gambar 33	Jumlah laporan dari 3 bulan terakhir yang ada di fasyankes
Gambar 34	Form yang menjadi rujukan fasyankes saat mengisi laporan ke BKKBN
Gambar 35	Persentase fasyankes dengan kartu stok yang informasi jumlah stoknya lengkap untuk semua layanan alokon BKKBN yang mereka berikan
Gambar 36	Persentase kartu stok yang jumlah di catatan cocok dgn hasil hitung fisik
Gambar 37	Persentase <i>stockout</i> dan penggunaan kartu stok (ya atau tidak) dibagi berdasarkan fasyankes dan metode kontrasepsi
Gambar 38	Persentase <i>stockout</i> dan akurasi (akurat atau tidak akurat) kartu stok dibagi berdasarkan fasyankes dan metode kontrasepsi
Gambar 39	Persentase fasilitas yang menggunakan data logistik
Gambar 40	Bagaimana petugas gudang mengakses data logistik
Gambar 41	Bagaimana fasyankes memakai data logistik untuk pengambilan keputusan
Gambar 42	Persentase fasilitas dengan minimal satu petugas dilatih tentang formulir F2/F5
Gambar 43	Persentase fasilitas dengan minimal satu petugas dilatih mengisi kartu stok
Gambar 44	Hasil kunjungan rutin dari mentor terhadap penggunaan dan akurasi kartu stok (data pemantauan)
Gambar 45	Persen fasilitas yang memenuhi 70% kondisi penyimpanan kunci
Gambar 46	Persen fasilitas yang memenuhi 70% kondisi penyimpanan kunci dibagi berdasarkan provinsi
Gambar 47	Persen fasilitas yang memenuhi setiap dari 14 kondisi penyimpanan kunci
Gambar 48	Persen fasilitas dengan mekanisme pengendalian suhu yang berfungsi dan suhu penyimpanan yang tepat dibagi berdasarkan jenis faskes
Gambar 49	Persen fasilitas dengan mekanisme pengendalian suhu yang berfungsi dan suhu penyimpanan yang tepat dibagi berdasarkan provinsi
Gambar 50	Persen petugas yang dilatih mengenai prosedur penyimpanan dibagi berdasarkan jenis fasilitas
Gambar 51	Persen fasilitas yang pada <i>endline</i> memiliki poster penyimpanan dibagi berdasarkan provinsi
Gambar 52	Persen fasilitas yang menerima kunjungan bimtek (keluarga berencana atau pengelolaan rantai pasok alokon)
Gambar 53	Siapa yang melakukan kunjungan bimtek terakhir
Gambar 54	Fasilitas saat <i>endline</i> yang merasa OJT dan umpan balik bermanfaat dibagi berdasarkan jenis fasilitas
Gambar 55	Fasilitas yang menerima OJT dan umpan balik tertulis di bimtek terakhir dibagi berdasarkan jenis fasilitas
Gambar 56	Persentase pertemuan TPK Kab/Kota yang diharapkan di keempat provinsi
Gambar 57	Persen fasilitas di <i>endline</i> yang menjadi bagian dari group <i>WhatsApp</i> dibagi berdasarkan jenis fasilitas
Gambar 58	Persen fasilitas di <i>endline</i> yang menjadi bagian dari group <i>WhatsApp</i> dibagi berdasarkan jenis fasilitas
Gambar 59	Jenis informasi yang dikirim ke group <i>WhatsApp</i> di <i>endline</i> (n=219)

Rujukan

Logistics System Assessment Tool (LSAT) dan **Logistics Indicators Assessment Tool (LIAT)** memberi metodologi terstandar untuk melakukan penilaian logistik secara kualitatif dan kuantitatif.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Guide to Conducting Supply Chain Assessments Using the LSAT and LIAT](#)

Versi standar dari perangkat tersebut ada di:



Data SIM-LOG (LMIS):
logistik.bkkbn.go.id
<http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/Klinik/Laporan2013/Bulanan/Faskes2013Tabel11.aspx>

| NO | WILAYAH |
|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|
| 01 | DKI Jakarta |
| 02 | Jawa Barat |
| 03 | Jawa Tengah |
| 04 | Jawa Timur |
| 05 | Sumatera Utara |
| 06 | Sumatera Barat |
| 07 | Riau |
| 08 | Lampung |
| 09 | Bengkulu |
| 10 | Sumatera Selatan |
| 11 | Maluku |
| 12 | Maluku Utara |
| 13 | Irian Jaya Barat |
| 14 | Irian Jaya Timur |
| 15 | Papua |
| 16 | Papua Barat |
| 17 | Gorontalo |
| 18 | Sulawesi Utara |
| 19 | Sulawesi Tengah |
| 20 | Sulawesi Selatan |
| 21 | Makassar |
| 22 | Yogyakarta |
| 23 | DIY |
| 24 | Jawa Barat |
| 25 | Jawa Tengah |
| 26 | Jawa Timur |
| 27 | Sumatera Utara |
| 28 | Sumatera Barat |
| 29 | Riau |
| 30 | Lampung |
| 31 | Bengkulu |
| 32 | Sumatera Selatan |
| 33 | Maluku |
| 34 | Maluku Utara |
| 35 | Irian Jaya Barat |
| 36 | Irian Jaya Timur |
| 37 | Papua |
| 38 | Papua Barat |
| 39 | Gorontalo |
| 40 | Sulawesi Utara |
| 41 | Sulawesi Tengah |
| 42 | Sulawesi Selatan |
| 43 | Makassar |
| 44 | Yogyakarta |
| 45 | DIY |

Pengumpulan Data:
<https://www.surveyccto.com/>





Pilihanku ✓



© JSI Research & Training Institute, Inc.
Jakarta, Indonesia
Email: jsi.idfp@gmail.com
Website: www.jsi.com